



MEDIAKEUANGAN

T R A N S P A R A N S I I N F O R M A S I K E B I J A K A N F I S K A L

GESIT MENGEMBAN MISI

Kebutuhan Indonesia akan percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi utama. Mandat pembangunan ini memerlukan strategi kebijakan dan peran fiskal. SMV Kementerian Keuangan hadir untuk mengemban misi khusus akselerasi pembangunan. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci agar tujuan pembangunan optimal.



Daftar Isi



Pada edisi Juni ini, kami ingin mengedukasi pembaca mengenai keberadaan Special Mission Vehicle (SMV). SMV membawa misi khusus yang utamanya adalah mempercepat pembangunan. Percepatan inilah yang kami gambarkan dengan sebuah mobil berkecepatan tinggi.

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel di bidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh melalui



App Store



Google Play



Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiyana. **Redaktur Pelaksana:** Yani Kurnia A. **Dewan Redaksi:** Ferry Gunawan, Dianita Suliastuti, Titi Susanti, Budi Sulisty, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S, Riva Setiara, Teguh Warsito, Hadi Suroho, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Sri Moedji Sampurnanto, Budi Sulistiyo. **Tim Redaksi:** Farida Rosadi, Reni Saptati D.I, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Rostamaji, Adik Tejo Waskito, Arif Nur Rokhman, Ferdian Jati Permana, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Muhammad Fabhi Riendi, Ika Dewi Puspitasari, Leila Rizki Niwanda, Kurnia Fitri Anidya, Ferdian Jati Permana, Buana Budianto Putri, Muhammad Irfan, Arimbi Putri, Nur Iman, Berliana. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Resha Aditya Pratama, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Muhammad Fath Kathin, Arief Kuswanadji, Intan Nur Shabrina, Ichsan Atmaja, Megan Nandia, Sugeng Wistriono, Rezky Ramadhani, Arif Taufiq Nugroho. **Desain Grafis dan Layout:** Venggi Obdi Ovisa, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra, A. Wirananda, Victorianus M.I. Bimo., **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

10 LINTAS PERISTIWA

14 TOPIK PILIHAN

15 TAGAR

LAPORAN UTAMA

17 Misi Istimewa Bangun Indonesia

20 Infografis

22 Akselerasi Membangun Negeri

25 Jangkau Seluruh Lapisan

27 SMV, inisiator percepatan pembangunan

TRIVIA

29 Tahukah Kamu?

WAWANCARA

30 Keluarga Soko Guru Bangsa

FIGUR

34 Memotivasi dan Mengilhami

OPINI

37 Berimbang Pahami Utang Negara

OPINI

40 Tangani Defisit Neraca Jasa Melalui Tarif PPN Nol Persen

POTRET KANTOR

42 Tantangan Jadi Peluang untuk Terdepan

PROFESI

44 Peramu Strategi Desentralisasi

REGULASI

46 Pendalaman Pasar Keuangan, Pemerintah Turunkan Nilai Penawaran *Private Placement* Surat Utang Negara

GENERASI EMAS

48 Hadirkan Keajaiban Teknologi di Dunia Pendidikan

BUGAR

51 Waspada! Bukan Batuk Biasa

RENUNGAN

52 Keterburuan yang Menyakiti

BUKU

53 Sarwono: Lelaki Hujan Bulan

LOKAL

54 Jelajah Bintang

FINANSIAL

56 Belajar Saham Bagi Karyawan

Jadwal Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel
Semester II Tahun 2019 (tentatif)11 - 25
Juli8 - 22
Agustus5 - 19
September10 - 24
Oktober6 - 20
November

Ayo Segera Berinvestasi,
SBN Ritel Hadir Lebih Sering
di Tahun 2019!!!

Dari Lapangan Banteng

SMV, Pembawa Misi Khusus Pengelolaan Fiskal

Kementerian Keuangan mempunyai tugas sebagai bendahara umum negara dan juga sebagai wakil pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga memiliki misi khusus yang sangat berhubungan dengan pengelolaan fiskal seperti misalnya penjaminan dan pembiayaan infrastruktur, pengembangan ekspor, pembiayaan perumahan dan lain-lain. Untuk dapat mengelola misi khusus tersebut maka dibentuklah beberapa korporasi maupun Badan Layanan Umum (BLU) sehingga penggunaan dana untuk misi khusus tersebut dapat lebih fokus dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi keuangan negara.

Bentuk badan usaha maupun BLU yang disebut **Special Mission Vehicles (SMV)** tersebut adalah PT. SMI, PT. PII, LPDP, PT. SMF, PT. Geo Dipa, LPEI, PIP, dan LPDP. Dalam perkembangannya, SMV ini juga digunakan untuk mengelola dana untuk kepentingan nasional. Contohnya adalah dana riset yang untuk sementara ini ditampung pada LPDP serta National Interest Account untuk penjaminan ekspor di LPEI.

SMV ini juga bertransformasi seiring dengan fungsinya yang makin beragam. Inovasi dalam bidang fiskal terwujud dalam Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU). Inovasi terkini adalah terkait kerjasama antara PT. SMI dengan lembaga filantropis



international Bloomberg Philanthropies dalam pengelolaan dana untuk *Sustainable Development Goals* di Indonesia.

SMV di Kementerian Keuangan sebagai pembawa misi khusus pengelolaan fiskal berperan besar dalam pembangunan di Indonesia. Dari sisi infrastruktur telah dirasakan banyak manfaatnya melalui penjaminan dan pembiayaan proyek yang bersifat nasional oleh PT. SMI, PT. PII, PT. SMF dan LMAN. Dari sisi pembangunan sumber daya manusia juga peran pengelolaan dana beasiswa melalui LPDP sangat memberikan harapan bagi generasi muda untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pasca sarjana. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai penggerak dana kredit bagi pengusaha ultra mikro juga memberikan bantuan besar bagi mereka yang tidak punya akses ke bank. Sementara itu LPEI memberikan pembiayaan, penjaminan dan pelatihan bagi para eksportir baik yang pemula maupun yang sudah besar.

Terlepas dari inovasi dan keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing SMV, Kementerian Keuangan juga perlu *refocusing* mandat dari masing-masing SMV tersebut. Keuntungan yang diperoleh tidak semata-mata diukur dari perolehan laba atau profit semata, tapi juga apakah sudah sesuai dengan mandat awal didirikannya SMV tersebut.

Oleh karena itu, peran penting dari masing-masing unit eselon satu yang membina SMV menjadi sangat penting. Selain itu, peran pembina pada unit eselon satu juga harus dipisahkan antara pembuat aturan (*regulator*) dan operasional (*operator*) sehingga terdapat batas yang jelas bagi SMV dalam menjalankan tugasnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah komunikasi kepada publik mengenai peran dan fungsi masing-masing SMV. Kementerian Keuangan sebagai induk dari semua SMV sudah mulai mensosialisasikan SMV secara terintegrasi. Masyarakat perlu tahu mengenai penggunaan dan pengelolaan keuangan negara. Terlebih lagi SMV ini juga berkecimpung dalam pengelolaan dana yang melibatkan masyarakat kecil untuk kredit usaha sampai pengusaha besar untuk penjaminan ekspor.

Nufransa Wira Sakti,
Kepala Biro Komunikasi dan
Layanan Informasi

MELAWAN TAKUT

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) harus melawan rasa takut akan ketinggian dan berisiko terjatuh ketika melakukan penilaian aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Aset yang dikelola Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java ini dimanfaatkan bersama sebagai fasilitas Floating Storage & Offloading Cinta Natomas di Tuban, Jawa Timur.

Foto
Nafiantoro
Agus Setiawan

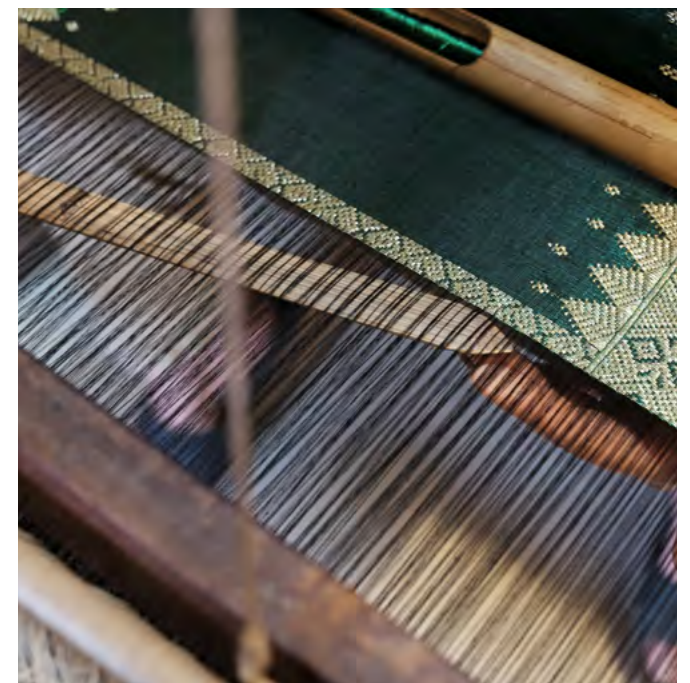




TENUN SIKEK NAN MOLEK

Kain tenun songket pandai sikek merupakan salah satu kain tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Pandai Sikek, Provinsi Sumatera Barat. Bagi masyarakat minangkabau, produk kerajinan songket dianggap memiliki nilai yang sangat tinggi. Oleh sebab itulah pemakaiannya hanya terbatas pada upacara penting tertentu. Peralatan utama yang dibutuhkan yaitu berupa seperangkat alat tenun yang terbuat dari kayu dan bambu serta benang tenun lusi atau lungsin yang dikombinasikan dengan benang makao.

Foto
Angga Rindra





01/05

Teks
Biro KLI

Foto
Asian Development Bank

Hasil Kegiatan ADB Annual Meeting ke-52 di Fiji

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri serangkaian kegiatan Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting yang ke-52 di Nadi, Fiji pada Rabu - Minggu, (01-05/05). Salah satu kegiatan tersebut adalah pertemuan bilateral antara Indonesia dan Fiji. Pemerintah Fiji menyampaikan keinginannya untuk melakukan diversifikasi pendanaan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mereka dan Pemerintah Fiji mengundang investor dari Indonesia untuk bergabung. Beberapa sektor yang menjadi fokus Pemerintah Fiji adalah turisme dan energi. “Indonesia akan terus melakukan kerjasama dengan Fiji dan akan melibatkan beberapa instrumen misalnya South-South Cooperation. Indonesia juga telah dan akan terus membangun infrastruktur khususnya di daerah Timur Indonesia yang masih terhubung dengan negara Pasifik,” terang Menkeu. Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Fiji menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia khususnya terkait bantuan Indonesia pada saat Fiji mengalami bencana alam.

Selain itu, Menkeu juga hadir dalam pertemuan negara-negara anggota program

Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF). Pertemuan ini juga merupakan rangkaian kegiatan ADB. SEADRIF adalah sebuah platform regional yang memberikan layanan konsultasi dan fasilitas keuangan kepada negara yang berpartisipasi. Harapannya, layanan ini mampu meningkatkan kesiapsiagaan, ketahanan, dan kerja sama antar negara Asia Tenggara dalam menanggapi risiko iklim dan bencana.

Kemudian pada pertemuan selanjutnya, ADB akan menghibahkan dana sebesar \$1 juta untuk penerapan MoU kerja sama lintas batas dan kerja sama antara provinsi Timor-Leste dan Nusa Tenggara Timur. Dalam MoU tersebut, Indonesia dan Timor-Leste bersepakat mengurangi hambatan transportasi darat dan udara lintas batas dan menyelaraskan prosedur di titik-titik persimpangan perbatasan. MoU ditandatangani oleh Presiden ADB Mr.Takehiko Nakao, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Keuangan Timor Leste Ms. Sara Lobo Brites. “MoU ini merupakan langkah kecil, namun penting dalam dukungan kami untuk kerja sama lintas batas antara Indonesia dan Timor-Leste,” kata Mr. Nakao.

25/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



PLTP Unit II Dieng dan Patuha Mulai Dibangun

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan proyek tenaga listrik panas bumi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek percepatan pembangunan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang makin meningkat. “Dengan perekonomian Indonesia yang tumbuh di atas 5% dan tingkat urbanisasi yang meningkat serta growing middle class yang sangat solid maka kita sudah paham bahwa kebutuhan terhadap tenaga listrik tidak akan menurun tapi justru akan makin meningkat,” ujar Menkeu dalam acara ground breaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit II Dieng dan Patuha oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan pada Kamis (25/04). Ground breaking Proyek PLTP Dieng Unit 2 dan Patuha Unit 2 merupakan langkah konkret Geo Dipa sebagai BUMN dan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu dengan misi mendukung program Pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan.



26/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Menkeu Tinjau Pelaksanaan Umi di Garut

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenalkan dan meninjau pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Garut sebagai salah satu program dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang cocok untuk Ibu-ibu yang ingin memulai usaha. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Situ Bagendit, Garut sebagai salah satu rangkaian acara “Sinergi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Pariwisata”. Kunjungan kerja ini bermaksud untuk melihat secara langsung potensi serta aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh para debitur pembiayaan UMi. “Kami, Kementerian Keuangan, ada program yang khusus untuk Ibu-ibu, terutama melalui program UMi. Tahun ini, UMi alokasinya Rp3 triliun untuk seluruh Indonesia,” jelas Menkeu di Situ Bagendit pada Jumat (26/04). Berdasarkan hasil testimoni Ibu-ibu debitur UMi di daerah Situ Bagendit, Menkeu percaya program pembiayaan UMi mampu membantu perekonomian di daerah, semakin berkembang.

30/04

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

DJP Kerjasama dengan 27 Institusi Bina UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan UMKM melalui program Business Development Services (BDS) DJP di Aula Cakti Budhi Bakti Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP pada Selasa, (30/04). Perjanjian kerjasama ini mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh 27 instansi. “Di Indonesia, pelaku usaha menengah dan kecil adalah pelaku yang sifatnya mayoritas di dalam jumlah statistiknya dan makin meningkatkan akurasi kewajiban perpajakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Pemberian pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM merupakan bagian dari program BDS yang telah dirintis DJP sejak tahun 2015. Layanan BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia.





Sukuk Tabungan Seri ST004 Diterbitkan

Mulai 3 Mei 2019, setiap individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dapat berinvestasi pada Sukuk Tabungan seri ST004. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka masa penawaran Sukuk Tabungan seri ST004. Imbal hasil ST004 sebesar 7.95%, dengan investasi minimal Rp1 juta. Investasi ini memiliki tenor 2 tahun dan memiliki mekanisme early redemption.

“ST004 adalah salah satu cara pemerintah membiayai kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, seperti halnya membangun infrastruktur untuk menunjang pendidikan hingga pelosok Indonesia,” jelas Direktur Jenderal (Dirjen) PPR Luki Alfirman pada acara Pembukaan Masa Penawaran Sukuk Tabungan seri ST004 di Executive Lounge Perpustakaan Nasional, Jakarta.

09/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



Kemenkeu Corpu Raih Holistic Human and Digital Bronze Award 2019

Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu) melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) berhasil meraih Holistic Human and Digital Bronze Award 2019 yang diadakan Global Council of Corporate University (GlobalCCU) di Sao Paulo, Brazil, 8 Mei 2019.

Penghargaan GlobalCCU ini diberikan kepada para praktisi terbaik Corporate University dari berbagai penjuru dunia. Kementerian Keuangan bersaing dengan belasan negara lain di antaranya India, Prancis, Brazil, Jerman, Rusia, Saudi Arabia, dan Swiss. Kemenkeu bersama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) menjadi perwakilan Indonesia yang berhasil lolos sebagai finalis di GlobalCCU Award. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap praktisi Corporate University yang menghasilkan nilai strategis untuk masyarakat dan bisnisnya.

09/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

09/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI



PSAK Terbaru, Perlu Kesamaan Interpretasi

Entitas Manajemen, Auditor dan Stakeholder harus mempunyai kesamaan interpretasi dan kesamaan kompetensi dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo saat memberikan keynote speech pada acara Forum Diskusi dengan tema “Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Baru PSAK 71, 72 dan 73” yang diselenggarakan oleh Kompas di Hotel JS Luwansa Jakarta, Kamis (09/05). Wamenkeu mengatakan bahwa dengan memahami PSAK terbaru ini maka entitas manajemen dalam tugas pelaporan keuangannya diharapkan bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang baik dan benar. “Di Kementerian Keuangan ada P2PK yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Dia harus benar-benar membimbing KAP agar KAP betul-betul bisa mumpuni, tahu betul mengenai PSAK sehingga interpretasinya juga jelas, tahu betul makna masing-masing PSAK 71 72 dan 73,” jelas Wamenkeu.



15/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Mindset ASN Harus Beradaptasi Hadapi Revolusi Industri 4.0

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan ASN harus merubah mindset dan perilaku agar bisa beradaptasi dengan revolusi Industri 4.0. Beberapa caranya adalah mempelajari, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat. Hal ini disampaikan Menkeu pada saat menjadi pembicara pada One Hour University dengan tema dengan tema “Menakar kesiapan ASN dalam Menghadapi Revolusi Industry 4.0 dan Transformasi Leadership di Era Disrupsi” di ruang Sarulla, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (15/05). “This digital economy dan industrial 4.0 memberikan banyak opportunity. Poinnya adalah negara yang efisien adalah rakyatnya yang pasti punya banyak ide. Dia bisa menterjemahkan ide tersebut menjadi realita dengan effort yang sekecil mungkin, dengan beban yang sekecil mungkin. Makanya, munculnya Google, Facebook itu ada di negara yang seperti itu,” kata Menkeu.

16/05

Teks
Biro KLI

Foto
Biro KLI

Kinerja APBN Hingga April 2019 Masih Aman

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja APBN hingga akhir april 2019 masih cukup aman. Hal itu disampaikannya dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi Mei 2019 di Aula Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (16/05). Ia mengatakan, di tengah prospek pertumbuhan ekonomi global yang melemah, kebijakan counter cyclical yang diambil Pemerintah dalam pengelolaan fiskal mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2019 sebesar 5,07 persen. “Jadi, dari situasi perekonomian kita yang mendapatkan tekanan dari luar maupun juga adanya indikasi tekanan di dalam, maka APBN memiliki fungsi yang cukup penting yaitu mengurangi tekanan tersebut sehingga melakukan fungsi counter cyclical-nya. Oleh karena itu, kita masih bisa melihat pertumbuhan ekonomi di atas 5% yaitu 5,07 lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal 1 pada 3 tahun terakhir,” jelasnya.



Anggaran Pindahan Ibu Kota Pemerintahan

Teks Abdul Aziz

Setelah Presiden Joko Widodo rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada akhir April lalu, topik wacana pemindahan ibu kota hangat dibicarakan oleh masyarakat. Selain pemilihan tujuan ibu kota baru, topik terkait anggaran pemindahan ibu kota juga semakin meningkat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri mengungkapkan anggaran dan skema pembiayaan terkait pemindahan ibu kota negara masih menunggu perencanaan yang matang dari Bappenas serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Senada dengan Menkeu, Direktur Jenderal Anggaran menjelaskan bahwa Kemenkeu perlu melakukan kajian secara komprehensif terkait kebutuhan dana pindahan ibu kota. Sementara itu, pakar politik dan pemerintahan Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf,

dan Anggota Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengapresiasi upaya pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta.

Menurut Asep, rencana tersebut adalah anugerah bagi Indonesia karena saat ini keadaan Jakarta sudah tidak kondusif. Namun infrastruktur harus diperhatikan karena merupakan penunjang roda pemerintahan. Menambahkan hal tersebut, Misbakhun turut mendukung dan ikut mencari solusi agar pemindahan ibu kota tak menguras anggaran negara. Menurutnya, dana pemindahan ibu kota bisa ditekan sekecil mungkin, atau bahkan tanpa menggunakan APBN.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan rencana pemindahan ibu kota ada dua skema. Skema pertama adalah memindahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke ibu kota baru

yang akan membutuhkan 40 ribu hektar lahan dan estimasi biaya sebesar Rp466 triliun untuk di luar Pulau Jawa. Skema kedua, tidak seluruh ASN pindah ke ibu kota yang baru, hanya sekitar 900 ribu jiwa yang akan membutuhkan 30 ribu hektar lahan dan estimasi biaya Rp323 triliun untuk di luar Pulau Jawa.

Terkait sumber pembiayaan yang akan digunakan, Menteri PPN mengusulkan empat alternatif pembiayaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni. Menteri PPN juga mengusulkan pendirian Badan Otoritas baru yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengelola pembangunan dan pemindahan ibu kota Indonesia.

Nufransa Wira Sakti, menjelaskan Kemenkeu akan mengganti persyaratan Perda menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) agar proses pencairan lebih cepat.

Foto Resha Aditya

TOPIK LAIN

Pemerintah melalui Kemenkeu, KPU dan Bawaslu berkomitmen memberikan apresiasi bagi para pahlawan demokrasi. Anggota KPU Evi Novida Ginting menjelaskan besaran santunan yang telah ditetapkan Menkeu dengan nilai maksimal Rp36 juta untuk korban meninggal. Terkait pencairan santunan, Dirjen Anggaran Askolani menuturkan prosesnya telah

diserahkan sepenuhnya kepada KPU dan Bawaslu sebagai pihak yang berwenang.

Topik hangat lainnya adalah pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri dan Pensiunan menjelang hari raya lebaran yang dipastikan tepat waktu. Menurut Menkeu, revisi Peraturan Pemerintah yang menjadi payung hukum pencairan dana tersebut akan segera rampung. Kepala Biro KLI Kemenkeu,

Setiap bulan Media Keuangan mengajak partisipasi pembaca untuk memberikan opini lewat kuis di kanal instagram @majalahmediakeuangan dan twitter @kemenkeuri. Opini yang diberikan menanggapi topik-topik hangat pilihan redaksi.

-  www.kemenkeu.go.id
-  [KemenkeuRI](#)
-  [@KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [KemenkeuRI](#)
-  [majalahmediakeuangan](#)



@majalahmediakeuangan Sampaikan secara singkat opini konstruktif Anda terkait pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa

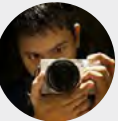


Like

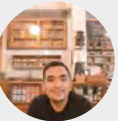
Reply



@mirantibenacorry Proses pemisahan antara pusat pemerintahan dan pusat bisnis bukan hal yang mudah namun diperlukan. Negara lain sudah dapat melakukannya, kita juga pasti bisa.



@anaass7 Menurut saya pemindahan ibu kota negara akan banyak manfaatnya antaraa lain: pertahanan dan keamanan lebih terjamin, kontrol urbanisasi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan perekonomian di ibu kota negara yang baru.



@joesitorus: Menurut pendapat saya, pemindahan ibu kota merupakan salah satu cara yang efektif dalam mengurangi beban Kota Jakarta. Dengan pemindahan ibu kota maka beberapa permasalahan dapat dikurangi bahkan diselesaikan.



@KemenkeuRI #KuisMediaKeuangan Sampaikan harapan #temankeu dengan dibentuknya SMV untuk akselerasi pembangunan di indonesia.



@autum9965 Semoga SMV mampu menjadi alternatif pendanaan pembangunan yg sdg kita galakkan di Indonesia. Tapi tetap harus ingat: KEHATI-HATIAN .., agar tidak justru menjadi penyebab krisis



@Sintong_Arfiyan Dibutuhkan agent yang adaptif, tak kaku dan inovatif terhadap kondisi ekonomi yang penuh dengan dinamisasi dan SMV adalah salah satu agent tersebut. Semoga SMV dapat menjadi katalis positif dari pemerintah dalam menghadapi ekonomi global.



@muhArief11 SMV dapat berpengaruh signifikan dalam menggenjot percepatan & kemajuan pembangunan di berbagai sektor dan proyek strategis negara tanpa bergantung APBN

Pembangunan Infrastruktur membuka akses dan memberi kesempatan daerah untuk maju dan berkembang

Foto
Dok. DJPPR

MISI ISTIMEWA BANGUN INDONESIA

Pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia hingga pelosok negeri. Tujuannya, agar seluruh masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Investasi pemerintah pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia digiatkan agar bersifat inklusif dan berkelanjutan. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi dan inovasi instrumen fiskal dalam menjawab tantangan pembangunan.

Tidak banyak yang tahu, selain menjalankan fungsi pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan juga diamanatkan untuk menjalankan misi khusus terkait tugas-tugas pembangunan. Misi pembangunan tersebut meliputi perangkat investasi, pengelolaan dana, penjaminan, hingga pembiayaan. Tugas tersebut selanjutnya dimandatkan kepada sejumlah Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta lembaga yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Mereka inilah yang dikenal dengan sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) Kementerian Keuangan.

Filosofi pembentukan

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menuturkan,

SMV di lingkungan Kementerian Keuangan pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. “(Namun), saat ini SMV memiliki tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama atau rutin,” jelasnya.

Lebih jauh Hadiyanto menyebutkan, selain mendukung investasi pemerintah, SMV juga mendukung penyediaan barang dan sarana publik. “Yaitu barang dan sarana publik yang (dibutuhkan) dan menguntungkan secara sosial ekonomi, tetapi tidak menguntungkan secara bisnis atau komersil,” ungkapnya.

Artinya, SMV bersedia mengambil peran pembiayaan, investasi, atau penjaminan terhadap sejumlah pembangunan layanan publik pemerintah. Meski pada saat yang sama, lembaga-lembaga lain tidak tertarik untuk terlibat. Sebab secara hitung-hitungan bisnis, proyek-proyek pembangunan tersebut dinilai tidak memberikan keuntungan.

Senada dengan itu, Direktur Kekayaan Negara yang Dipisahkan Ditjen Kekayaan Negara (KND DJKN), Dedi Syarif mengatakan, SMV berperan besar dalam mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah. “SMV senantiasa diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana yang *prudent*, bertanggungjawab, transparan, dan terukur,” terang Dedi.

Selanjutnya, Dedi menambahkan, salah satu peran SMV adalah mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). “Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur, diantaranya adalah sektor jalan tol, pelabuhan, perumahan, kebandarudaraan, air minum, serta sarana dan prasarana perkeretaapian,” sebutnya.

Dalam membangun infrastuktur, SMV memberikan sejumlah fasilitas yang meliputi pembiayaan



Pemerintah fokus untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan.

Foto Dok.LMAN

infrastruktur, pendanaan pengadaan tanah, serta penjaminan infrastruktur. Selanjutnya, fasilitas lain yang diberikan SMV bisa berupa pembiayaan dan penjaminan ekspor, sekuritisasi aset dan penyaluran pinjaman, hingga pengembangan energi terbarukan. Sementara dari sisi pembangunan manusia Indonesia, SMV berperan dalam pengelolaan *endowmnet fund* untuk pemberian beasiswa pendidikan dan pendanaan riset. “Setiap SMV memiliki karakteristik peran sesuai dengan mandat yang telah diberikan dan saling bersinergi untuk mendukung program nasional,” tegasnya.

Sepak terjang SMV

Saat ini terdapat delapan SMV di bawah Kementerian Keuangan. Empat diantaranya merupakan BUMN, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), PT. Sarana Multiguna Finansial (PT. SMF), serta PT. Geo Dipa. Tiga SMV lainnya merupakan BLU, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Sementara satu SMV lainnya merupakan lembaga, yaitu Lembaga Pengelola Ekspor dan Impor (LPEI).

Dalam hal percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, PT. SMI, PT.PII dan LMAN memiliki peran yang begitu penting. PT. SMI, misalnya, berperan dalam hal penyediaan pembiayaan infrastruktur, termasuk mendukung pelaksanaan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam praktiknya, PT. SMI bekerja sama dengan institusi multilateral, lembaga donor, dan pihak swasta guna menyalurkan dana pengembangan proyek infrastruktur.

Direktur KND DJKN, Dedi Syarif menyebutkan, hingga 2018 PT. SMI telah membiayai sebanyak 198 proyek infrastruktur dengan total nilai proyek sebesar Rp553 triliun. “Dari jumlah tersebut, PT SMI telah mendukung terwujudnya 52 PSN senilai Rp69,9 triliun,” rinci Dedi.

Selanjutnya, peran PT.PII sebagai katalis pembangunan infrastruktur adalah dengan memberikan penjaminan pemerintah terhadap risiko yang ditanggung Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Hal ini dilakukan guna meningkatkan *bankability* dan *creditworthines* proyek-proyek infrastruktur. PT. PII juga membantu PJPK dalam melakukan persiapan dan pendampingan transaksi proyek infrastruktur. Diketahui hingga 2018, PT.PII telah menjamin sebanyak 16 proyek KPBU dengan total nilai proyek mencapai Rp176 triliun.

Sementara peran BLU LMAN di bidang infsratuktur terkait dengan pendanaan lahan untuk PSN. LMAN bertugas melakukan penggantian uang ganti rugi tanah, sertifikasi, serta peningkatan nilai tanah. “Sampai dengan 2018, total pengantian dana talangan tanah yang telah dikeluarkan oleh LMAN adalah sebesar Rp32, 97 triliun untuk PSN pada sektor jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bendungan,” ungkap Dedi.

Selain berperan dalam menyediakan pembiayaan bagi infrastruktur. Terdapat sejumlah SMV lain yang juga memiliki fungsi melaksanakan pembiayaan dengan bidang yang berbeda-beda, yaitu PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI),

serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

PT. SMF memberikan dukungan terhadap program nasional dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan. Selain itu, PT. SMF juga memungkinkan terwujudnya kepemilikan rumah yang terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia dengan cara meningkatkan tersedianya sumber dana, baik untuk jangka menengah maupun panjang di sektor perumahan. Hingga akhir 2018, PT. SMF diketahui telah berkontribusi terhadap pelaksanaan sekuritisasi aset KPR sebesar Rp10,15 triliun, serta penyaluran pinjaman hingga Rp47,5 triliun.

Fungsi penyediaan pembiayaan lain juga diemban oleh PT. LPEI. SMV ini memberikan pembiayaan perdagangan terhadap kegiatan ekspor nasional. Hal ini dilakukan melalui pemberian pinjaman, penjaminan atau asuransi, hingga jasa konsultasi yang berkaitan dngan pembiayaan perdagangan luar negeri. Diketahui hingga 2018, PT. LPEI telahmenyalurkan pembiayaan sebesar Rp109,16 triliun, penjaminan sebesar Rp11,31 triliun, serta asuransi sebesar Rp11,32 triliun.

Sementara itu, BLU PIP berperan positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. PIP menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat kepada para pelaku usaha ultramikro. Pembiayaan tersebut dilakukan melalui penyaluran langsung kepada pelaku usaha, maupun secara tidak langsung melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Hingga 2018, diketahui tidak kurang dari 757 ribu nasabah telah dibiayai dengan realisasi penyaluran LKBB sebesar Rp1,7 triliun.

Perangkat SMV juga berandil besar dalam membangun kualitas

manusia Indonesia. Misi tersebut diemban oleh BLU LPDP yang mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), berupa dana abadi pendidikan (*endowment fund*), dan dana cadangan pendidikan. Diketahui hingga 2018, LPDP telah memberikan beasiswa senilai Rp9,1 triliun kepada 20.255 *awardee*, serta pendanaan penelitian senilai Rp257 miliar untuk 150 penelitian.

Misi khusus pembangunan selanjutnya juga dimandatkan kepada PT. Geo Dipa Energi (PT.Geodipa). Perannya mendukung ketahanan energi nasional bagi Indonesia. PT Geodipa mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yg berasal dari sumber daya terbarukan, khususnya panas bumi. Hingga 2018, SMV ini telah memproduksi listrik mencapai 744 Gigawatt hours (GWh).

Optimalkan potensi

Pemerintah menyadari pentingnya sinergi dan koordinasi antar-SMV dalam mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah. Selain itu, diperlukan pengawasan guna mengevaluasi pelaksanaan mandat serta capaian kerja SMV. Itu sebabnya, pada 2018 dibentuk Komite Pengarah dan Pengelola Kebijakan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan.

Komite dibentuk melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 808/KMK.01/2018. Selanjutnya, komite ini menjadi wadah untuk saling berkoordinasi lintas eselon I di Kementerian Keuangan. “Komite tersebut memastikan SMV melaksanakan apa yang telah dimandatkan kepadanya, khususnya terkait peran SMV sebagai *fiscal tools*,” ungkap Sekretaris Jenderal Hadiyanto.

Dia menambahkan, pengawasan

dilakukan terhadap organ-organ entitas SMV yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas. “Demikian juga unit terkait melakukan pengawasan,” katanya.

Tidak dapat dipungkiri, perbedaan mandat yang diberikan kepada masing-masing SMV menjadi tantangan tersendiri. Terutama, dalam kaitannya dengan upaya sinergi dan koordinasi antar-SMV. Melalui sinergi yang baik, diharapkan kinerja SMV dapat mencapai hasil paling optimal.

Inisiator pembiayaan kreatif

Keterbatasan anggaran yang disandingkan dengan kebutuhan pembangunan menuntut pemerintah mencari skema pembiayaan lain di luar APBN. Peran ini juga diembanan kepada SMV Kemenkeu. Hadiyanto menuturkan, terdapat sedikitnya lima skema pembiayaan inovatif yang diinisiasi SMV.

Pertama, *project development facility* (PDF). Menurut Hadiyanto, fasilitas ini diberikan oleh pemerintah (Kemenkeu) untuk membantu PJPK menyusun kajian prastudi kelayakan, dokumen lelang, serta pendampingan untuk PJPK dalam transaksi proyek KPBU sehingga mencapai penyelesaian pembiayaan (*financial close*).

Kedua, *viability gap fund* (VGF). Dia menjelaskan, skema ini merupakan bentuk dukungan finansial dalam bentuk hibah terhadap biaya konstruksi proyek-proyek KPBU. “Dengan demikian, proyek tersebut dinilai layak secara finansial,” tambahnya.

Ketiga, *infrastructure guarantee*. Skema pembiayaan ini memberikan penjaminan berupa *risk sharing* yang hanya diberikan untuk proye KPBU. Risiko yang dijamin terdapat dalam PMK Nomor 38 Tahun 2016 yang meliputi risiko politik akibat perubahan regulasi, risiko kinerja, serta risiko permintaan akibat penawaran yang lebih rendah dari rencana bisnis awal.

Keempat, *availability payment scheme*. Skema ini memungkinkan pengembalian investasi kepada badan usaha pelaksana KPBU melalui pembayaran bertahap.

Terakhir, pembentukan *platform Sustainable Development Goals Indonesia One* (SIO). Skema ini mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya bagi infrastruktur yang telah memperoleh komitmen, baik dari lembaga bilateral/multilateral, maupun lembaga filantropi dari dalam dan luar negeri.

Teks Farida Rosadi

SPECIAL MISSION VEHICLES



SMV dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama/rutin.

SMV dibentuk juga untuk mendukung investasi pemerintah dan penyediaan barang dan sarana publik yang dibutuhkan secara sosial ekonomi meskipun tidak menguntungkan secara bisnis/komersil.

SKEMA PEMBIAYAAN YANG DIINISIASI SMV

- Project Development Facility (PDF) Viability Gap Fund
- Infrastructure Guarantee
- Availability Payment Scheme

FUNGSI-FUNGSI YANG DIEMBAN

- Dukungan implementasi KPBU
- Penjaminan
- Pembiayaan
- Asuransi
- Investasi/pengelolaan dana

PROYEK PEMBANGUNAN YANG DITANGANI SMV



PT PII

- 10 proyek jalan tol
- 4 proyek telekomunikasi
- 1 proyek sector ketenagalistrikan
- 3 proyek sector air minum
- 1 proyek perkeretaapian



PT SMF

- penyaluran dana KPR FLPP kepada 28.932 debitur
- total penyaluran dana Rp948 miliar
- Total Penyaluran FLPP 2018 Rp5.896 triliun



PT SMI

Pembiayaan Komersial

- 9 Jalan Tol
- 7 Transportasi
- 6 Kelistrikan
- 1 Telekomunikasi

Pembiayaan Daerah berupa 20 offering letters yg terdiri dari

- 12 jalan
- 7 Rumah Sakit
- 1 Pasar

Pengembangan Proyek

- Rp 4,8 T total nilai proyek
- 3 Penugasan KPBU

*proyek tahun 2018



PT GEO DIPa

4 Wilayah Kerja Panasbumi (WKP)

PT Geo Dipa

- WKP dataran tinggi Dieng,
- WKP Patuha,
- WKP Umbul Telomoyo
- WKP Arjumo Welirang.

Potensi/Sumber daya WKP

- WKP dataran tinggi Dieng: 1,000 MWe
- WKP Patuha: 400 MWe
- WKP Umbul Telomoyo: 110 Mwe
- WKP Arjumo Welirang: 190 Mwe



LPEI

Pertumbuhan Bisnis LPEI tahun 2018

- Pembiayaan : 108,896 miliar Rupiah
- Penjaminan : 11,307 miliar Rupiah
- Asuransi: 11,322 miliar Rupiah

Nilai Manfaat Fasilitas Ekspor:

- Pembiayaan 109 T
- Membiayai 923 eksportir
- Lebih dari 160 negara pasar tujuan ekspor



LPDP

Jumlah Penerima Beasiswa LPDP dr tahun 2013 - 2017

- Magister & Doktoral (BPI Reg)= 10.620
- Magister & DOKtoral (BUDI) = 2.794
- Magister & Doktoral (Afirmasi)=4.132
- Magister & Doktoral (Top Up) =187
- Dokter Spesialis =480
- Beasiswa Presiden RI =109
- Doktor Lanjutan = 17
- Tesis & Disertasi = 1.814
- Beasiswa Indonesia Timur=102



LMAN

- 39 ruas jalan tol
- 44 bendungan
- 4 Irigasi
- 5 jalur Kereta Api

*proyek yang pembebasan lahannya dibayarkan oleh LMAN tahun 2018



PIP

- Jumlah penerima program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) 933.482 debitur
- Total nilai penyaluran 2,508 T
- Profil debitur 92% perempuan 8% pria



MANDAT MASING-MASING SMV

PT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII)

Penjaminan infrastruktur (*sovereign guarantee provider*)

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI)

- Pemberian pinjaman langsung untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
- Pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

PT. SARANA MULTIGRIYA FINANCIAL (SMF)

Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)

Melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menkeu, dan berdasarkan peraturan UU

PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)

Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN)

Menjadi operator pengelola barang dalam mengoptimalkan aset negara yang dianggap belum terutilisasi secara optimal (underutilized) dan yang tidak digunakan/dimanfaatkan atau mangkrak (idle)

PT GEO DIPa ENERGI

Mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik yang berasal dari sumber daya terbarukan khususnya panas bumi.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)

Melaksanakan pembiayaan ekspor nasional melalui pembiayaan, penjaminan asuransi, jasa konsultasi, kegiatan lainnya (penugasan khusus).

AKSELERASI MEMBANGUN NEGERI

Pembangunan
Interconnecting
dermaga dengan
jalan tol

Foto
Dok. LMAN

D i tengah panasnya matahari, bunyi mesin terdengar meraung-raung dengan kencangnya. Mobil warna hitam yang ditumpangi oleh satu keluarga itu hendak keluar dari pemberhentian sementara di salah satu Rest Area Salatiga. Mereka hendak melanjutkan perjalanan menuju Surabaya dari Jakarta. Tahun lalu, mereka membutuhkan waktu tempuh hampir sehari semalam melalui jalur darat. Namun, dengan adanya jalur tol yang sudah menyambung, kini, jika kondisi lancar, satu keluarga itu hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari dua belas jam.

Tol Trans Jawa membuktikan bahwa konektivitas menjadi kunci kelancaran arus barang/jasa, serta manusia. Dengan semakin mudahnya arus perpindahan tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi akan semakin tumbuh merata dan inflasi semakin terkendali.

Proyek Strategis Nasional

Tol Trans Jawa merupakan salah satu dari 227 proyek strategis nasional (PSN) pemerintah yang dirilis pada pertengahan tahun 2018. Dalam rilis tersebut, pemerintah menuangkan PSN dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 tahun 2018 yang merupakan Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Menurut Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Dedi Syarif Usman, Kementerian Keuangan memiliki peran besar untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah, yang salah satunya mendukung pembangunan infrastruktur PSN. Salah satunya adalah dengan mengoptimalkan peran Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta

Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV).

Menurut Dedi, SMV senantiasa diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana yang *prudent*, bertanggungjawab, transparan, dan terukur. Lebih jauh, Dedi mengungkapkan dalam mendukung kebijakan fiskal negara, SMV telah mengambil peran penting percepatan pelaksanaan PSN melalui dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di antaranya sektor jalan tol, pelabuhan, perumahan, kebandarudaraan, air minum, sarana dan prasarana perkeretaapian. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, SMV memberikan berbagai fasilitas meliputi pembiayaan infrastruktur, pendanaan pengadaan tanah, penjaminan infrastruktur, dan sekuritisasi aset dan penyaluran pinjaman.

“Setiap SMV memiliki karakteristik peran sesuai dengan mandat yang telah diberikan dan saling bersinergi untuk mendukung program nasional. Selain menjalankan tugas khusus tersebut, SMV juga berkontribusi bagi penerimaan negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelas Dedi.

Membiayai infrastruktur

Dari segi dukungan pembiayaan infrastruktur, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) berperan strategis sebagai SMV pembiayaan, investasi, jasa konsultasi serta penyiapan proyek infrastruktur. Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, menjelaskan pembiayaan proyek pemerintah yang dilakukan oleh PT SMI dilakukan tidak hanya untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), namun juga untuk proyek prioritas nasional dan PSN.

“Secara total *project* kurang lebih lebih sekitar Rp247,2 triliun kita ikut berpartisipasi dalam PSN, *priority projects*, dan yang *listed* dalam RPJMN. Tapi komitmennya hanya Rp45,9 triliun. Jadi artinya dari negara *leverage* ke SMI, dari SMI *leverage* lagi mengundang *private sector*. Artinya kita sudah 25 persen sendiri kita *take up*, sisanya diambil oleh *private*,” jelas Emma.

Sampai dengan Maret 2019, PT SMI telah memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia melalui 272 proyek infrastruktur dengan nilai sebesar Rp1.270,8

triliun. Selain pilar pembiayaan dan investasi, PT SMI juga berperan dalam memberikan jasa konsultasi dan pengembangan proyek.

PT SMI juga mengelola dana *Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia One sebesar US\$2,46 miliar. SDGs Indonesia One merupakan pendanaan dari para swasta, pemerintah, lembaga donor dan filantropi. Pada umumnya SDGs Indonesia One merupakan pendanaan dari luar negeri yang dikelola oleh PT SMI dalam rangka mendukung pemerintah dalam usahanya mewujudkan proyek-proyek yang mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Lebih jauh, Emma menjelaskan beragam proyek infrastruktur tersebut telah menciptakan sejumlah manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Misalnya, penerangan bagi 3,2 juta rumah, air bersih untuk 8,1 juta jiwa, irigasi untuk 185 hektar sawah, serta menciptakan 1,97 juta lapangan pekerjaan selama masa konstruksi.

Menjamin infrastruktur

Tak hanya pendanaan saja yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan infrastruktur. Armand Hermawan, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), menambahkan bahwa untuk memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, sebagai SMV, PT PII berkontribusi dalam memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak

kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia, melindungi kepentingan Pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Armand, lebih lanjut, menjelaskan peran aktif PT PII dalam menyediakan solusi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Saat ini, PT PII menjadi satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) di Indonesia. Sampai saat ini, PT PII telah memberikan jaminan pada 19 proyek infrastruktur skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha pada lima sektor, yakni Jalan Tol, Telekomunikasi, Ketenagalistrikan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Transportasi.

“Selain itu, PT PII juga menyediakan penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga multilateral, yaitu PT ITDC untuk proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” jelasnya.

Di sisi lain, PT PII juga berperan membantu penyiapan dan pendampingan transaksi dalam bentuk *Project Development Facility* (PDF) atas empat proyek infrastruktur skema KPBU pada sektor kesehatan, jalan dan transportasi. Seluruh proyek yang telah diberikan dukungan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pengadaan lahan

Hal lain yang penting dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembebasan lahan itu sendiri. Lahan menjadi hal yang krusial karena infrastruktur hanya dapat dibangun setelah lahannya siap. Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rahayu Puspasari, menuturkan kepada Media Keuangan bahwa peran pemenuhan pendanaan lahan tersebut menjadi salah satu tugas LMAN sebagai SMV untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur nasional.

LMAN sendiri merupakan lembaga pemerintah berbentuk BLU yang memiliki fleksibilitas dalam hal penggunaan anggaran. Artinya, penggunaan anggaran untuk pembayaran pembebasan lahan tidak tergantung pada tahun anggaran. Tercatat, alokasi pengadaan tanah

untuk mendukung PSN LMAN dalam tiga tahun terakhir terdiri dari Rp16 triliun untuk 2016, Rp32,05 triliun untuk 2017, Rp31,15 triliun untuk 2018, dan Rp21,99 triliun untuk tahun 2019.

“Jadi kalau di 2016 itu kita *me-support* 27 proyek jalan tol, di 2017 kita *me-support* 46 proyek yang terdiri dari 32 jalan tol, 10 proyek bendungan, 3 proyek jalur kereta api dan 1 proyek pelabuhan yang di Patimban. Di 2018 kita *me-support* 88 proyek, terdiri dari 39 proyek jalan tol, 44 proyek SDA (Sumber Daya Air) dan 5 proyek jalur kereta api. Itu kira-kira yang sampai dengan 2018. Kalau 2019 berdasarkan alokasi anggaran, direncanakan kita akan *mensupport* 53 proyek, cukup banyak,” jelas Puspa.

Infrastruktur rumah rakyat

Selain infrastruktur utama di atas, program sejuta rumah juga menjadi salah satu agenda besar PSN. Menurut Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial, kebutuhan terhadap perumahan di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data BPS, *backlog* perumahan tahun 2017 sebesar 13,7 juta. Informasi terakhir yang diperoleh dari Kementerian PUPR diperkirakan pada akhir tahun 2018 angka *backlog* telah mencapai 11 juta.

Menurut Ananta, sebagai salah satu SMV, PT SMF berperan aktif dalam memberikan dukungan industri pembiayaan perumahan di Indonesia. Kegiatan utama PT SMF adalah menyediakan dana likuiditas bagi penyalur KPR untuk dapat digunakan dalam mendukung penyaluran KPR, serta membeli portofolio KPR dari bank dan

menerbitkan efek beragun aset melalui transaksi sekuritisasi.

Ananta menjelaskan lebih lanjut, pada tahun 2019, kebutuhan pendanaan nasional khusus KPR subsidi mencapai Rp9 triliun yang digunakan untuk membiayai 68.000 rumah. Melalui kerjasama dengan BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), PT SMF berperan menyediakan dana 25 persen yang merupakan porsi bank dalam KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Di tahun 2019 ini, sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh Pemegang Saham, target pelaksanaan transaksi sekuritisasi oleh SMF mencapai Rp2,2 triliun dan penyaluran pinjaman sebesar Rp10 triliun. Selain itu, PT SMF juga turut mendukung pengembangan sektor pariwisata nasional dengan membantu fasilitas pembiayaan *Homestay* pada sepuluh destinasi wisata di Indonesia.

Di sisi lain, PT SMF juga telah mengembangkan program KPR Pasca Bencana yang dikhususkan untuk menolong masyarakat terdampak bencana alam dengan skema pembiayaan melalui lembaga penyalur KPR khususnya BPD. “Tahun 2019 ini, PT SMF telah mendatangi perjanjian kerjasama dengan Bank NTB Syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat di Lombok yang terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami,” pungkasnya.

Teks Abdul Aziz

PLTP Unit Dieng

Foto
Dok. PT. Geo
Dipa Energi



JANGKAU SELURUH LAPISAN

Letak geografis negeri kita amat istimewa. Berada di titik pertemuan lempeng tektonik Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia, serta masuk ke dalam jalur *Ring of Fire*. Tak mengherankan jika gempa bumi dan gunung meletus sering melanda. Namun, di balik potensi bahaya, ada berkah berlimpah. Salah satunya, energi panas bumi.

Potensi terbesar di dunia

Indonesia tercatat sebagai negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. “Kita memiliki kurang lebih 40 persen dari total cadangan dunia,” ungkap Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Riki Ibrahim. Satu-satunya BUMN panas bumi di Indonesia tersebut merupakan *Special Mission Vehicles* (SMV) Kementerian Keuangan. Untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik energi panas bumi yang aman dan ramah lingkungan, Riki menjelaskan saat ini PT Geo Dipa Energi mengelola empat Wilayah Kerja Panasbumi (WKP). “Kita punya WKP Dieng, Patuha, Arjuna Welirang, dan Umbul Temoyo.”

Pemanfaatan panas bumi jelas dapat memperkuat ekonomi nasional. Berkurangnya penggunaan dan impor BBM berdampak pada penghematan penggunaan devisa negara. Tak hanya itu, Riki menuturkan, perusahaan yang dipimpinnya turut berkomitmen mendukung pengurangan emisi karbon CO₂. “Pada tahun 2023, PT Geo Dipa Energi dengan kapasitas PLTP sebesar 270 MWe akan turut aktif menyumbangkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar kurang lebih 1,7 ton per tahun dan melistriki tempat tinggal sebanyak 540.000 rumah,” ujar Riki.

Dorong ekspor nasional

Cikal bakalnya sudah ada sejak 1999 dalam bentuk PT Bank Ekspor Indonesia. Sepuluh tahun kemudian, melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) resmi beroperasi. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur

Eksekutif LPEI Sinthya Roesly menerangkan LPEI sebagai SMV pemerintah memiliki mandat khusus untuk mendukung peningkatan ekspor. “LPEI dimandatkan untuk mendukung peningkatan ekspor melalui produk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Tidak hanya itu, LPEI pun diberikan penugasan khusus dalam bentuk program *National Interest Account* (NIA),” tutur Sinthya. NIA merupakan program pemerintah untuk *project* atau transaksi yang sulit dilaksanakan secara komersial, tetapi dianggap perlu untuk dilakukan oleh pemerintah.

Sejak didirikan hingga tahun 2018, lembaga ini berhasil menyalurkan pembiayaan hingga Rp108,896 triliun, hanya dengan *capital injection* sebesar Rp7 triliun. Sementara itu, pertumbuhan bisnis penjaminan lembaga ini mencapai Rp11,307 triliun dan bisnis asuransi menyentuh Rp11,322 triliun. Untuk jasa konsultasi, Sinthya mengungkapkan secara sistematis LPEI baru memulainya di tahun 2015. Namun, dalam rentang waktu tersebut, LPEI berhasil memberikan pelatihan pada lebih dari 1.500 UKM berbasis ekspor.

Untuk penugasan khusus ekspor dalam rangka NIA, LPEI memberikan dukungan terhadap sektor industri strategis, antara lain industri kereta api dan penerbangan. Pembiayaan LPEI juga diberikan untuk meningkatkan ketahanan usaha furnitur dan tekstil. Sinthya optimis, NIA sebagai *policy tools* pemerintah menambah devisa negara, meningkatkan *competitiveness* tenaga kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Dukung kemandirian usaha

Menyasar pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum *bankable*, pemerintah meluncurkan skema pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Plafon pembiayaan dibatasi maksimum Rp10 juta/ nasabah dan disalurkan tidak melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ditunjuk sebagai *coordinated fund* pembiayaan UMi.

Plt. Direktur Utama PIP Djoko Hendratto mengungkapkan prinsip PIP ialah *empowering* dan *enhancing*. Artinya, PIP memberikan pinjaman kepada LKBB yang bergerak membiayai usaha mikro supaya mereka memperluas kreditnya kepada usaha mikro lainnya. Dengan demikian, LKBB meningkatkan pendampingan yang telah dilakukan kepada debiturnya. “Konsep ini sangat pas dan sangat bagus untuk

menjawab masalah ketepatan sasaran,” kata Djoko.

Hingga Mei 2019, PIP menyalurkan dana Rp2,508 triliun kepada 933.842 debitur. Saat ini, PIP juga tengah mengembangkan digitalisasi pembiayaan UMi dengan menggandeng penyedia teknologi digital. Untuk mengoptimalkan perannya, ke depannya PIP akan bersinergi dengan kementerian/ lembaga dan menggandeng lembaga komersil serta non-komersil swasta untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Indonesia.

Siapkan pemimpin masa depan

Namanya sangat dikenal para pemburu beasiswa. Namun, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebenarnya tak hanya menyelenggarakan program beasiswa untuk generasi terbaik bangsa. SMV Kementerian Keuangan ini juga menyediakan pendanaan riset komersial/implementatif untuk mendorong inovasi, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam.

Sejak 2013 hingga 2018, tercatat ada 20.255 penerima beasiswa LPDP. Sekitar 50 persen diantaranya merupakan beasiswa pendidikan Indonesia reguler untuk magister dan doktor. Pada rentang waktu yang sama, tercatat sudah ada 150 kontrak riset inovasi produktif dengan total nilai kontrak Rp257,243 miliar. Angka-angka ini akan makin bertambah, lantaran LPDP berkomitmen mengelola dana pendidikan untuk para calon pemimpin bangsa. Para calon pemimpin yang disiapkan untuk membangun Indonesia.

Teks Reni Saptati D.I.

SMV, INISIATOR PERCEPATAN PEMBANGUNAN

Selain diamanatkan untuk menjalankan fungsi pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan juga mengemban misi khusus (*special mission*) untuk melaksanakan tugas pembangunan. Misi khusus tersebut dijalankan oleh Badan Layanan Umum (BLU) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan atau dikenal dengan sebutan *Special Mission Vehicle* (SMV). Simak wawancara Media Keuangan bersama Sekretaris Jenderal, Hadiyanto mengenai SMV berikut.

Apa latar belakang pembentukan *Special Mission Vehicle* (SMV)?

SMV di lingkungan Kementerian Keuangan pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Saat ini, SMV memiliki tugas-tugas pembangunan yang diamanatkan kepada Menteri Keuangan di luar fungsi pengelolaan fiskal utama atau rutin, seperti pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi

perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan.

Selain itu, SMV juga dibentuk untuk mendukung investasi pemerintah, serta mendukung penyediaan barang dan sarana publik yang menguntungkan secara sosial ekonomi (*positive externalities*). Namun, tidak menguntungkan secara bisnis atau komersil.

Fungsi-fungsi yang diemban Kemenkeu terkait SMV antara lain, dukungan implementasi *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk juga di dalamnya penyiapan proyek, penjaminan, dan pembiayaan. Selanjutnya fungsi Kemenkeu terkait SMV juga meliputi fungsi penjaminan, pembiayaan, asuransi, serta investasi atau pengelolaan dana.

SMV merupakan bagian dari tranformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Dapatkah Bapak menjelaskan lebih jauh mengenai hal ini?

Terminologi SMV pertama kali disebutkan pada

Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Foto Anas Nur Huda

tahun 2014 dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Sementara itu, seluruh SMV yang ada saat ini dibentuk sebelum tahun 2014 dalam bentuk BUMN di bawah Kemenkeu, Badan Hukum Sui Generis, dan Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu rekomendasi dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan tersebut yaitu pembentukan Komite Pengarah SMV guna menyelesaikan beberapa isu yang dihadapi SMV. Isu-isu tersebut meliputi pertama, *mandate, policy, strategy*. Kedua, *ownership, governance, reporting*, dan *legal structure*. Ketiga terkait prosesnya. Melalui transformasi kelembagaan, diharapkan berbagai isu terkait pengelolaan SMV tersebut dapat diselesaikan.

Saat ini terdapat sekitar 8 SMV di Kementerian Keuangan. Bagaimana sinergi multi proyek yang dilakukan antar sejumlah SMV?

Untuk memastikan terwujudnya sinergi multi proyek yang dilakukan oleh sejumlah SMV, maka sesuai rekomendasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan, dibentuk Komite Pengarah SMV. Pembentukan komite dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 808/KMK.01/2018 tentang Komite Pengarah dan Pengelola Kebijakan SMV di lingkungan Kementerian Keuangan. Tugas Komite SMV antara lain pertama, merekomendasikan *alignment* mandat dari SMV dan kesesuaiannya dengan kebijakan fiskal dan kebijakan nasional, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. Termasuk juga, identifikasi

potensi *overlapping* mandat dan penugasan. Kedua, melakukan evaluasi, analisis, dan/atau mengusulkan penambahan atau pengurangan mandat bagi SMV, sejalan dengan kebijakan fiskal pemerintah atau peran fiskal SMV. Ketiga, merumuskan kebijakan strategis dan peraturan perundangan terkait SMV. Terakhir, melaksanakan monitoring pencapaian *outcome* SMV.

Apa tantangan yang dihadapi mengkoordinasikan dan mengelola kinerja SMV selama ini?

Tantangan yang dihadapi oleh Komite SMV terkait koordinasi dan pengelolaan kinerja SMV yaitu mandat yang dimiliki seluruh SMV berbeda-beda, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk mensinergikannya agar mencapai hasil optimal. Selanjutnya, *key performance indicator* (KPI) dari masing-masing SMV masih belum optimal dalam mencerminkan pencapaian atas mandat yang diberikan, sehingga diperlukan perbaikan mekanisme monitoring dan evaluasi KPI SMV.

Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Kemenkeu terhadap SMV?

Kemenkeu melakukan pengawasan terhadap SMV melalui Komite Pengarah dan Pengelola Kebijakan SMV. Komite tersebut memastikan SMV melaksanakan apa yang telah dimandatkan kepadanya, khususnya terkait peran SMV sebagai *fiscal tools*. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui organ-organ entitas SMV, seperti RUPS, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Demikian juga unit terkait melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Sejauh ini bagaimana respons masyarakat terkait keberadaan SMV?

Respons masyarakat terhadap keberadaan SMV sangat positif. Hal ini dikarenakan SMV dibentuk untuk mendukung penyediaan barang dan sarana publik yang menguntungkan secara sosial ekonomi (*positive externalities*). Masyarakat sangat merasakan manfaat kehadiran SMV ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dampak yang diberikan oleh PT SMI yang meliputi 1,9 juta lapangan kerja, 2.700 km jaringan serat optik, 2.253,2 km jalan tol, 3,3 juta akses listrik, 1.031 kamar rumah sakit, 2 juta rumah memperoleh akses listrik, serta 52.000 menara telekomunikasi. Hal ini tentu disambut baik masyarakat.

Selain dari yang ada saat ini, apakah terbuka kemungkinan adanya SMV baru?

Dunia senantiasa berubah, dan untuk menghadapi perubahan tersebut kita harus selalu siap untuk melakukan transformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Penambahan, pengurangan, atau merger SMV adalah hal yang mungkin dilakukan jika memang dibutuhkan, demi tujuan yang lebih besar guna mewujudkan akselerasi pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas dan kapasitas SMV menjadi penting, termasuk dukungan regulasi yang diperlukan.

Bagaimana peran SMV dalam mengakselerasi pembangunan di Indonesia?

Peran SMV dalam mengakselerasi pembangunan Indonesia adalah dengan membantu Pemda, PJPk, Eksportir dalam mempersiapkan proyek infrastruktur maupun dalam rangka fasilitas ekspor. Selain itu, SMV juga berperan dalam membentuk skema-skema pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan, mengingat dana APBN saja tidak mampu memenuhi kebutuhan dana pembangunan.

Beberapa skema pembiayaan yang diinisiasi SMV antara lain *Project Development Facility* (PDF), *Viability Gap Fund* (VGF), *Infrastructure Guarantee*, *Availability Payment Scheme*, serta pembentukan *platform Sustainable Development Goals Indonesia One* (SIO). Dengan banyaknya dukungan skema *financing* tersebut diharapkan dapat mewujudkan percepatan pemerataan proyek pembangunan dan realisasinya melalui pemanfaatan SMV.

Teks Farida Rosadi

Trivia

Tahukah kamu?



Dua hari pasca proklamasi kemerdekaan, **Dr. Samsi Saastrowidagdo** didapuk sebagai Menteri Keuangan. **Menteri Keuangan pertama** ini menjabat mulai 19 Agustus 1945 sampai dengan 2 September 1945.



Pada masa **kepemimpinan A. A. Maramis**, Kementerian Keuangan pertama kali membentuk susunan organisasi. Susunan pertama kali ini **terdiri dari lima pejabat** (sekarang jabatan Eselon I) yakni Pejabatan Umum, Pejabatan Keuangan, Pejabatan Pajak, Pejabatan Resi Candu dan Garam, serta Pejabatan Pegadaian.



Saat pemindahan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada Januari 1946, **Kementerian Keuangan turut pindah** kendati tidak semuanya pindah ke Yogyakarta. Pejabatan Pajak ke Magelang, Pejabatan Pegadaian ke Prembun, serta Pejabatan Resi Candu dan Garam pindah ke Solo.

Foto
Dok. PERPUSNAS

Foto
Dok. DJP



Keluarga Soko Guru Bangsa

Keranjang *gadget* menjadi salah satu problematika anak usia dini

Foto Arief K.

Keluarga sebagai soko guru bangsa berperan penting menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak. Memperingati Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni, Media Keuangan menemui Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikel) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Sukiman, M.Pd. Unit kerja yang dipimpinnya baru terbentuk tahun 2015 lalu. Namun, kiprahnya dalam meningkatkan kapasitas keluarga demi mencerdaskan bangsa sudah dirasakan melalui program-program pelibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan anak di sekolah. Berikut petikan wawancara dengan doktor di bidang PAUD tersebut.

Apa saja program Direktorat Bindikel?

Kami punya empat program utama, yaitu penyelenggaraan pertemuan orang tua dan wali kelas, kelas orang tua/wali, kelas inspirasi, dan penyelenggaraan kegiatan pentas kelas akhir tahun. Baru-baru ini kami juga dilibatkan mengembangkan kapasitas orang tua dalam pendidikan pada 1000 Hari Pertama

Kehidupan (HPK), terutama sebagai bagian upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*. Hampir semua Kementerian/Lembaga dilibatkan karena program ini merupakan prioritas utama Presiden di bawah koordinasi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).

Menurut hasil-hasil penelitian, masalah *stunting* ini terutama disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman orangtua. Sesungguhnya penanggulangannya tidak terlalu sulit, tetapi kurangnya pemahaman orang tua menyebabkan mereka abai terhadap kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Program-program kami lainnya fokus memperkuat fungsi keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Lantaran berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami menggunakan jalur satuan pendidikan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua.

Seperti kampanye mengantar anak pada hari pertama sekolah?

Iya, itu salah satunya. Program pelibatan keluarga di pendidikan anak sudah menjadi tren di banyak negara. Hasil-hasil penelitian menyimpulkan kolaborasi yang baik antara orang tua dengan sekolah dampaknya luar biasa, bukan hanya bagi peserta didik, tetapi bagi orang tua dan juga bagi kemajuan sekolah secara keseluruhan. Kolaborasi dibentuk antara orang tua dengan wali kelas saja supaya cakupannya tidak terlalu luas. Dengan demikian, komunikasinya lebih intensif dan berbagai perkembangan anak bisa dikomunikasikan, termasuk terkait kehadiran anak. Dengan perkembangan teknologi informasi, seharusnya mudah untuk bisa mengkomunikasikan berbagai problematika yang terjadi pada anak.

Apa problematika yang paling banyak dihadapi anak-anak di Indonesia?

Untuk anak usia dini, angka *stunting* atau kerdil masih cukup tinggi. Data 2013 menunjukkan angka 37 persen, lalu data 2018 turun menjadi 30 persen. Pada umumnya, faktor *stunting* disebabkan kurangnya gizi. Hal itu akan berdampak terhadap perkembangan otak. Nah, mengapa ada program 1000 HPK? Sebab rentang waktu inilah yang paling menentukan anak itu akan *stunting* atau tidak, yakni mulai dalam kehamilan sampai usia dua tahun.

Problematika lain untuk anak usia dini misalnya penyakit cacingan yang mencapai angka 28 persen, anemia yang menimpa hampir separuh anak-anak Indonesia, keranjang *gadget*, dan kurangnya kesadaran imunisasi. Sebetulnya sarana dan fasilitas dari pemerintah sudah cukup, tetapi kembali lagi ke kesadaran orang tua.

Bagaimana dengan problematika usia remaja?

Beranjak ke usia remaja, *bullying* sudah sangat memprihatinkan. Kemudian ada masalah kekerasan/perkelahian, pornografi, dan narkoba. Sekitar 70 persen penghuni lapas terkena kasus narkoba. Belum lagi penyimpangan perilaku dan radikalisme yang juga perlu diwaspadai.

Berbagai problematika tadi sangat memerlukan kewaspadaan dari keluarga dan sekolah. Keluarga harus sensitif terhadap gejala-gejala anak, apakah anak memiliki kecenderungan suka mem-*bully*, apakah anak-anak suka melakukan kekerasan, apakah anak-anak sudah mulai belajar merokok, dan lainnya.

Untuk itu, kami berupaya mengembangkan komunikasi positif. Sebuah hal sederhana tetapi sangat penting. Terkadang orang tua lupa memeluk anak, padahal pelukan itu luar



"Banyaklah berkomunikasi dengan anak supaya mereka bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang utuh, handal, dan lebih bermutu dari kita."

Dr. Sukiman, M.Pd
Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga (Bindikel) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

biasa dahsyatnya. Perlakuan manis orang tua ke anaknya melampau seribu kata-kata. Interaksi anggota keluarga saat makan atau saat-saat tertentu juga perlu didorong. Perlu ada aturan-aturan keluarga yang membuat mereka itu bisa berinteraksi.

Terkait dengan itu, kami mengimbau keluarga untuk melaksanakan gerakan 18-20. Saya hanya ambil dua jam, yaitu 18.00 hingga 20.00, tetapi mau sampai 21.00 juga boleh. Selama dua jam itu, berinterasilah dengan keluarga, bisa dengan beribadah bersama, makan bersama, atau aktivitas-aktivitas lain yang tidak bersentuhan dengan *gadget*. Nah, kalau ini bisa dilakukan, hubungan anggota keluarga akan lebih harmoni. Ini tentu merupakan iklim yang sangat bagus terhadap tumbuh kembang anak maupun keberhasilan anak dalam mengikuti pendidikan.

Bagaimana tanggapan masyarakat dengan program-program pelibatan orangtua?

Tanggapannya beragam. Sebuah perubahan tidak mungkin langsung disetujui semua pihak. Namun, hingga saat ini mayoritas menanggapi positif.



Direktur
Bindikel sedang
berinteraksi
dengan anak-
anak.

Foto
Dok. Direktorat
Bindikel

Hasil monitoring dan evaluasi tahun 2018 terhadap keluarga di satuan pendidikan pada 22 provinsi menunjukkan 89 persen orang tua menjawab program kami sangat bermanfaat dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak dan membantu mereka melakukan kontrol terhadap hal-hal negatif. Selain itu, orang tua juga berpendapat bahwa program pelibatan keluarga di satuan pendidikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan hubungan positif dengan putra-putri mereka serta meningkatkan kemampuan belajar putra-putri mereka di sekolah.

Apa saja hambatan yang dihadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak?

Mata pencaharian orang tua sangat beragam sehingga bukan hal mudah mengumpulkan mereka. Oleh karena itu, kami mengimbau paguyuban kelas, carilah waktu yang paling memungkinkan orang tua bisa hadir. Jadi kapan waktu yang pas? Itu kembali ke kesepakatan orang tua. Saya pernah studi banding ke Italia. Orang Italia tidak mau hari Sabtu Minggu diganggu untuk keperluan seperti itu lantaran merupakan hari keluarga. Mereka bersepakat pertemuan orangtua itu dilakukan malam hari. Yang kita harapkan di sini yakni ada kesepakatan masalah waktu. Hal kedua yang kami tekankan, pastikan bahwa setiap pertemuan bermakna bagi orang tua. Ada komunikasi di antara orang tua tentang bagaimana anaknya mampu mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak lain juga.

Tahun ini kami akan gencarkan lagi kampanye hari pertama sekolah. Selain itu, untuk anak PAUD, kami sedang memulai kampanye membacakan buku yang kita sebut Gerakan Nasional Orang Tua Membacakan Buku (Gernas Baku). Konsepnya sederhana, orang tua hadir ke lembaga PAUD, membawa buku

untuk dibacakan di depan anak, kemudian membuat diskusi tentang bacaan itu dengan anak. Jadi, ada interaksi dalam waktu sekitar setengah jam. Kita galakkan lagi program itu dengan harapan berimplikasi di rumah. Hal tersebut bermanfaat untuk menggeser waktu dengan *gadget* dan TV. Kami bahkan membuat lagu *jingle* untuk memotivasi masyarakat. “Ayah bunda bacakan aku buku, baca buku membuat aku tahu”, sederhana saja lagunya.

Apa harapan Anda untuk keluarga Indonesia?

Keluarga adalah soko guru pendidikan bangsa, pendidik pertama dan utama. Bahkan, bukan hanya pertama, tapi selamanya. Orang tua harus mampu menjadi pendamping, teman, dan *partner* anak-anak. Masa perkembangan dan pertumbuhan anak tidak lama, masa-masa indah itu jangan diabaikan. Banyaklah berkomunikasi dengan anak supaya mereka bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi yang utuh, handal, dan lebih bermutu dari kita. Jadi, saya berharap, keluarga Indonesia menyadari apa peran pentingnya dalam pendidikan anak.

Teks Reni Saptati D.I



MINISTRY OF FINANCE
FISCAL POLICY AGENCY



4th AIFC

ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE

JW Marriott Hotel Surabaya, July 24 - 25 2019

Blending Islamic Finance and Impact Investing for the SDGs

visit:

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/aifc2019/>

live streaming:



<https://bppk.kemenkeu.go.id>

Memotivasi dan Mengilhami

Dwi Irianti Hadiningdyah

Direktur Pembiayaan Syariah

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Foto
Anas Nur Huda

Gemercik air semakin membesar. Muara suara itu menuju badan sungai besar yang legendaris, Bengawan Solo. Di tepi sungai terdapat lapangan yang cukup

luas. Riuh rendah suara dari anak-anak yang bermain bersama. Sesosok tubuh mungil berlari menghampiri teman-temannya yang sedang bermain lompat tali. Permainan tradisional dari karet gelang ini memang selain membutuhkan kelincahan fisik, juga membutuhkan fokus yang kuat. Meski sempat diremehkan oleh teman-temannya, gadis kecil itu pun menanggukkan hatinya dan berlari kencang untuk melompat. Hasilnya, meskipun dia paling kecil namun dia berhasil melompat paling tinggi di antara teman-teman sebayanya. Semenjak itulah ia merasa semua cita-cita bisa diraih sepanjang ada kemauan dan usaha keras. Ia berhasil menunjukkan komitmen yang kuat dari motivasi dirinya.

Di sisi lain, sosok ayah yang seorang prajurit TNI Angkatan Darat dan pernah menjabat sebagai NDANRAMIL di Kedunggalar Ngawi, memberikan nilai lebih pada gadis itu. Semenjak kecil, ia diajarkan untuk berdisiplin tinggi. Tiap hari harus tidur siang, berbeda dengan teman-teman di lingkungannya yang bebas bermain. Setiap sore selepas maghrib harus belajar dan ditungguin. Berkat kedisiplinan yang luar biasa, ia menjadi terlatih untuk selalu tepat waktu. Bahkan, ia selalu merasa tidak nyaman apabila terlambat. Kini, semua bekal didikan itu telah membuatnya berhasil menjadi salah satu pejabat eselon 2 di Kementerian Keuangan. Ialah Dwi Irianti Hadiningdyah yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pembiayaan Syariah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Selain kedisiplinan yang kuat, sang ayah juga selalu menunjukkan kasih sayang. Sebagai hadiah untuk keberhasilan dirinya masuk di sekolah favorit di kotanya, sang ayah memberikan hadiah yang tak biasa. Dwi diberi hadiah khusus sapi. Sapi yang dipelihara dan berkembang itulah yang menjadi cikal bakal biaya untuk

sekolah dirinya hingga lulus perguruan tinggi.

“Jadi, investasi itu sudah dari dulu diajarkan oleh Bapak saya. Contohnya dari bentuk hadiah sapi. Terus sapinya beranak-pinak dan itu menjadi biaya sekolah saya hingga kuliah di Universitas Diponegoro (Undip). Sampai lulus. Alhamdulillah,” cerita Dwi.

Tanpa melamar

Pasca lulus dari Fakultas Hukum Undip tahun 1990, kira-kira 2 minggu setelah wisuda, Dwi bersama beberapa temannya yang masuk *the best ten* mendapatkan panggilan dari Biro Hukum dan Humas Sekretariat Jenderal, Departemen Keuangan untuk diwawancarai dalam *crash* program pascasarjana di Amerika. Yang menarik, hari pertama bekerja ia baru mulai melengkapi berkas-berkas administrasi untuk penerimaan pegawai, termasuk membuat surat lamaran. Selanjutnya, Dwi harus mengikuti program pendidikan pascasarjana ke Amerika tahun 1992. University of Delaware menjadi pilihannya untuk mengambil Master of Art in Economics. Sepulang dari Amerika, Dwi kembali ke Biro Hukum dan Humas, yang sekarang berkembang menjadi Biro Hukum, Biro KLI dan Biro Advokasi.

Pada tahun 2005 sebagai Kasubag Hukum Lembaga Keuangan yang menangani Hukum asuransi, dana pensiun dan pasar modal, ia diminta untuk mewakili Biro Hukum dalam membahas permintaan pelaku pasar keuangan kepada Pemerintah dalam hal ini ditujukan kepada Pusat Manajemen Oblogasi Negara (PMON) yang merupakan cikal bakal DJPPR.

Saat itu pelaku pasar mendesak Pemerintah untuk menerbitkan obligasi syariah karena ada kebutuhan dari pasar akan instrumen tersebut. Setelah terus menerus melakukan pembahasan, ia dan tim pun berhasil meyakinkan pimpinan bahwa obligasi syariah tidak hanya akan menjadi alternatif sumber pembiayaan APBN, namun juga menjadi wujud kehadiran Pemerintah dalam mendukung

keuangan syariah. Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat itu pun ternyata sangat mendukung. Awalnya akan dibuat PERPPU tentang Obligasi Syariah, namun hal itu tidak diperbolehkan karena bukan dalam situasi genting atau darurat. Akhirnya diputuskan untuk dimasukkan dalam draft RUU tentang SBSN di akhir Desember 2007.

Berkat dukungan dari pimpinan yang sangat tinggi, pembahasan UU SBSN di DPR hanya membutuhkan waktu tiga setengah bulan. Pada tanggal 7 Mei 2008, UU nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah atau Sukuk Negara berhasil diundangkan. Tiga setengah bulan kemudian, SBSN pertama sudah diterbitkan di pasar domestik.

Legal Engineering

Setelah UU SBSN rampung, ternyata masih banyak pekerjaan rumah lainnya karena adanya perkawinan antara hukum positif dengan syariah. Kendala berikutnya terkait *underlying asset* yang berupa Barang Milik Negara yang mana penggunaannya harus dengan jual beli, sementara dari hukum positif akan sulit untuk menjual belikan BMN dalam kurun waktu tertentu dan akan dibeli kembali pada saat jatuh tempo. Sehingga munculah aturan hukum baru di Indonesia yaitu jual beli hak manfaat atau *beneficial ownership*. Jadi penggunaan BMN sebagai *underlying* SBSN bisa tetap jalan tanpa harus secara legal positifnya berpindah tangan.

Tidak berhenti sampai disitu, setelah beberapa tahun muncul masalah karena keterbatasan BMN, Dwi dan timnya harus berinovasi dalam membuat struktur akad syariah baru yang memungkinkan penggunaan *underlying asset* selain BMN yang antara lain penggunaan proyek-proyek Pemerintah Pusat. Maka munculah *project financing* sukuk dengan memakai struktur akad *ijarah to be leased*.

Sebagai bagian dari *legal engineering* dalam penerbitan SBSN atau Sukuk Negara ini ternyata juga diperlukan adanya *Special Purpose Vehicle* berupa Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.

Akhirnya dibentuklah badan hukum khusus yang organ perusahaannya hanya berupa 3 direktur yang semuanya dijabat secara ex-officio oleh pejabat yang menangani penerbitan SBSN. Saat ini, Dwi juga menjabat secara ex-officio menjadi Direktur 6 Perusahaan Penerbit SBSN tanpa mendapatkan tambahan fasilitas apapun.

Kejujuran sebagai pendidikan

Bengawan Solo memang menyimpan sejuta cerita. Begitu pula bagi Dwi dan kedua orang tuanya, Adiprayit dan Harti Sunarni. Meski tidak memiliki *role model* di bidang hukum secara langsung, sosok ayah yang juga anggota TNI menjadikan Dwi pribadi yang disiplin dan jujur. Pernah suatu ketika, Bapaknya mengetahui bahwa dirinya diterima di Kementerian Keuangan. Sang ayah langsung menanamkan satu pesan kejujuran kepada dirinya. Sebagai abdi negara, ayahnya melarang dirinya bermain-main dengan pekerjaan, terutama terkait dengan mengambil hak orang lain apalagi bermain dengan uang negara. “Sekecil apapun penyalahgunaan uang dan kewenangan akan membawa derita rakyat”, ungkap Dwi mengenang pesan bapaknya.

“Sikap kedisiplinan, kejujuran dan ketegasan itulah yang mungkin membentuk saya mencintai hukum. Karena itu benar-benar yang terefleksi dari sifat-sifat itu. Seorang Sarjana Hukum memang harusnya seperti itu, ‘bicara tegas, *confident*, dan selalu menjunjung kejujuran dan keadilan’,” tegasnya mengenang sosok ayah.

Di sisi lain, sosok Ibu juga memberikan inspirasi tersendiri. Ibunya adalah sosok yang aktif dalam kegiatan sosial, seperti perkumpulan istri TNI AD atau Persit dan organisasi PKK. Lebih jauh, sang ibu juga aktif di kelompok pertanian (Klompencapir) dan berhasil ikut serta lomba ke tingkat nasional, walau langkahnya terhenti sampai tingkat provinsi. Dwi dan kakak semata wayangnya sangat mengagumi sosok sang ibu yang selalu memberikan kasih sayang dan kedisiplinan dalam mendidik sampai keduanya menyelesaikan pendidikan pascasarjana.



Dwi bersama dengan keluarga saat kelulusan putrinya



Dwi menerima penghargaan untuk IFR Awards dan IFN Awards atas keberhasilannya mengelola Sukuk Negara

Foto
Dok. Pribadi

di antara kita. Jadi kita *trust* ke suami dan ke anak-anak. Mereka pun juga *trust* ke kita,” ungkapnya.

Bekerja sebagai ibadah

Ditanya terkait harapan, Dwi mengungkapkan bahwa pekerjaan itu ibadah, sementara jabatan adalah amanah sehingga ia menganggap menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya itu wajib dan tidak perlu berharap untuk mendapatkan jabatan tertentu. Akan tetapi, apabila jabatan sudah diamanahkan maka harus dijalankan sebaik-baiknya dan insyaallah akan selalu mendapatkan pertolongan Allah dalam menjalaninya. Pekerjaan sebagai ibadah selalu ditanamkan pada dirinya, mengingat sebagian besar waktu Dwi dihabiskan untuk bekerja.

“Apabila tidak diniatkan sebagai ibadah, maka semua itu hanya akan sia-sia,” ujarnya. Selain itu, dengan meniatkan sebagai ibadah, Dwi merasa lebih tenang karena setiap tindakan akan diawasi oleh Allah. Prinsip ini juga ditanamkan Dwi kepada rekan-rekan di Direktorat Pembiayaan Syariah yang ia pimpin.

Teks Abdul Aziz

Tangani Defisit Neraca Jasa Melalui Tarif PPN Nol Persen

Hadi Setiawan dan Ami Muslich,
Peneliti, Badan Kebijakan Fiskal

Kondisi *current account* Indonesia terus mengalami defisit sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. *Current account* atau biasa disebut “Transaksi Berjalan” oleh Bank Indonesia, atau disebut “Akun Lancar” oleh Faisal Basri, merupakan seluruh transaksi perdagangan luar negeri suatu negara. Transaksi perdagangan dimaksud mencakup seluruh transaksi ekspor dan impor barang, jasa, pendapatan primer serta pendapatan sekunder (Bank Indonesia, 2014). Istilah transaksi ekspor maupun impor barang dan jasa tentu sudah cukup familiar dengan kita. Namun, istilah pendapatan primer dan pendapatan sekunder barangkali masih cukup asing untuk dipahami.

Pendapatan primer merupakan transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja, serta pendapatan

investasi. Pendapatan investasi bisa berasal dari investasi langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Sementara itu, pendapatan sekunder mencakup penerimaan dan pembayaran transfer berjalan oleh sektor pemerintah dan sektor lainnya. Transaksi pendapatan sekunder sektor lainnya juga mencakup transfer dari tenaga kerja (*workers’ remittances*) atau transfer uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Penyebab utama defisit pada *current account* kita berasal dari defisit di pendapatan primer. Berturut-turut perbandingan nilai defisit pendapatan primer dan defisit *current account* tahun 2016-2018 adalah US\$29,65 miliar dan US\$16,95 miliar, US\$32,12 miliar dan US\$16,20 miliar, serta US\$30,42 miliar dan US\$31,06 miliar. Defisit pendapatan primer ini merupakan konsekuensi dari investasi asing di Indonesia, baik investasi secara langsung, maupun investasi dalam bentuk portofolio. Setiap orang asing yang menanamkan investasi di Indonesia tentu mengharapkan imbal balik berupa penghasilan. Hal itulah yang tercermin dalam defisit pendapatan primer. Artinya, apabila nilai investasi semakin tinggi, dapat dipastikan pada tahun-tahun setelahnya defisit pendapatan primer juga semakin tinggi. Apalagi, jika pemain atau pengusaha di Indonesia belum mampu menancapkan kuku-kukunya di negara-negara lain.

Penyebab defisit *current account* berikutnya berasal dari transaksi ekspor dan impor jasa Indonesia. Sudah sejak puluhan tahun yang lalu, Neraca Pembayaran Jasa Indonesia selalu mengalami defisit. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2018, neraca pembayaran jasa defisit sebesar USD7,1 miliar. Adapun jasa-jasa yang berkontribusi membuat neraca pembayaran jasa mengalami defisit, yaitu jasa transportasi (24,4 persen dari total



Sebagaimana praktik pengenaan PPN tarif nol persen atas ekspor jasa yang juga terjadi di negara lain, maka tantangan selanjutnya adalah pengawasan atas kegiatan ekspor jasa yang terutang tarif PPN nol persen.

defisit neraca jasa), jasa telekomunikasi, komputer dan informasi (22,29 persen), biaya penggunaan kekayaan intelektual (19,73 persen), jasa bisnis lainnya (13,22 persen), jasa asuransi dan dana pensiun (9,05 persen), jasa keuangan (6,19 persen), serta jasa pemeliharaan dan perbaikan (2,83%). Sementara itu hanya ada lima sektor jasa yang menyumbang angka surplus pada neraca pembayaran. Kelima sektor jasa yang tersebut, yaitu pemerintah (9,37 persen), jasa manufaktur (5,38 persen), jasa konstruksi (3,92 persen), serta jasa personel, kultural dan rekreasi (3,91 persen). Kontribusi surplus yang diberikan adalah sebesar 75,16 persen dari defisit neraca pembayaran jasa.

Tarif PPN nol persen Untuk Ekspor Jasa

Jasa transportasi merupakan jasa yang berkontribusi paling besar terhadap defisit neraca pembayaran jasa Indonesia. Bahkan, hal ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Adapun penyebab defisit pada jasa transportasi adalah ketidakmampuan perusahaan pelayaran untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pelayaran asing. Dalam kasus ini, perusahaan penerbangan kita juga andil dalam menyumbang angka defisit. Hal ini tercermin dari angka defisit jasa transportasi penumpang sebesar USD1,37 miliar. Untuk mengobati defisit pada jasa transportasi ini, dibutuhkan upaya yang *breakthrough* serta dukungan dari semua pihak. Pihak pemerintah, misalnya, melalui insentif fiskal maupun nonfiskal. Sementara upaya dari pihak swasta dapat berupa dukungan untuk bermain lebih banyak di sektor ini.

Berikutnya, guna mengurangi defisit dari sektor jasa lainnya, serta meningkatkan kontribusi dari sektor jasa yang selama ini sudah mencatatkan surplus, pemerintah menerbitkan aturan khusus pada 29 Maret 2019. Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.10/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Dalam beleid PMK ini disebutkan bahwa pemerintah telah menambah jumlah jasa yang diberikan tarif PPN nol persen secara sangat signifikan. Sebelumnya, hanya terdapat tiga ekspor jasa yang diberikan tarif PPN nol persen, yaitu jasa kontruksi, jasa perbaikan dan perawatan serta jasa maklon. Maka, sejak 29 Maret 2019 jumlah ekspor jasa yang diberikan tarif PPN nol persen bertambah menjado 10 jenis jasa dengan pengertian yang sangat luas.

Sebagian besar dari kesepuluh jenis jasa tersebut merupakan sektor jasa yang menyumbang defisit pada neraca pembayaran jasa selama ini. Misalnya, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi yang merupakan penyumbang kedua terbesar untuk defisit neraca pembayaran jasa. Untuk jenis jasa ini, pemerintah mendefinisikannya secara sangat luas. Selanjutnya, pemerintah juga memberikan tarif nol persen untuk jasa R&D yang merupakan salah satu sumber untuk menciptakan kekayaan intelektual. Jasa penggunaan kekayaan intelektual sendiri merupakan penyumbang ketiga terbesar untuk defisit neraca pembayaran jasa. Demikian

juga dengan jasa bisnis lainnya, serta jasa pemeliharaan dan perbaikan yang juga mendapat perlakuan yang sama. Sementara terhadap penyumbang defisit jasa terbesar pertama, yaitu jasa transportasi, pemerintah juga memberikan perlakuan yang sama. Tarif PPN nol persen untuk jasa transportasi diberikan terhadap jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor, serta jasa persewaan alat angkut berupa kapal laut untuk kegiatan pelayaran internasional.

Melalui tarif PPN nol persen, maka pajak masukan dari pembelian barang dan jasa dari pengusaha yang melakukan ekspor jasa dapat dikreditkan. Selanjutnya, pengusaha tersebut dapat meminta restitusi PPN, sehingga harga jual, atas jasa yang diekspor tersebut, berpotensi menjadi lebih rendah karena telah dibersihkan dari komponen PPN. Rendahnya harga jual akan meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia, sehingga diharapkan ekspor jasa Indonesia dapat tumbuh signifikan. Sementara bagi jasa-jasa yang selama ini telah menciptakan surplus, diharapkan juga akan terdorong untuk bisa bersaing lebih baik lagi dengan jasa sejenis dari negara lain, seperti jasa konstruksi dan jasa maklon (jasa manufaktur).

PMK ini diharapkan mampu menurunkan defisit neraca pembayaran jasa. Meskipun, untuk membuatnya menjadi surplus, diperlukan strategi dan kebijakan yang tidak hanya berasal dari fiskal, melainkan juga dari sisi nonfiskal.

Sebagaimana praktik pengenaan PPN tarif nol persen atas ekspor jasa yang juga terjadi di negara lain, maka

tantangan selanjutnya adalah pengawasan atas kegiatan ekspor jasa yang terutang tarif PPN nol persen. Mengingat jasa merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat seperti layaknya barang, maka Direktorat Jenderal Pajak, selaku institusi yang berwenang, harus dapat memastikan bahwa pengusaha memang benar-benar melakukan ekspor jasa. Artinya, bukan sebatas modus agar pajak masukan pengusaha tersebut dapat dikreditkan, sehingga mereka mengajukan restitusi yang

seharusnya bukan hak mereka. Namun demikian, dengan modal 45 ribu pegawai pajak, serta keandalan sistem informasi dan teknologi yang dimiliki, maka bagi Ditjen Pajak, hal ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditangani.



Ilustrasi Dimach Putra

BPJS Kesehatan Syariah, Kenapa Tidak?

Bahtiar Fitkhasya Muslim,
Badan Kebijakan Fiskal

Salah satu hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia tahun 2015 yaitu tentang panduan jaminan kesehatan nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah sebab mengandung unsur garar, maisir, dan riba. Dalam rekomendasinya, MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah, dan melakukan pelayanan prima.

Menurut anggota komisi Fatwa MUI saat itu, Jaih Mubarak, MUI memberikan beberapa saran agar BPJS dapat berjalan sesuai syariah, diantaranya menghilangkan denda jika peserta telat membayar (selama ini peserta membayar 2 persen), pelayanan kesehatan harus merata, serta memisahkan iuran menjadi uang hibah (*tabarru'*) dan tabungan yang dikelola secara syariah (*tijarah*). Sementara itu, ahli keuangan syariah Adiwarman Karim menilai ada tiga hal yang harus disempurnakan pihak BPJS Kesehatan agar bisa beroperasi sesuai prinsip syariah, meliputi pengelolaan dana peserta atau *tabarru'* harus dipisahkan dari dana perusahaan, dana yang dikelola harus

ditempatkan di instrumen investasi syariah seperti sukuk, dan menghilangkan denda jika peserta telat membayar.

Dari beberapa pendapat ini, terdapat tiga hal yang dapat dilakukan BPJS Kesehatan supaya layanannya sesuai prinsip syariah, yakni menyelenggarakan pengelolaan dana peserta atau *tabarru'* yang terpisah dari dana perusahaan, menempatkan dana yang dikelola di instrumen investasi syariah, serta menghilangkan denda jika peserta telat membayar. Pemisahan pengelolaan dana peserta dari dana perusahaan sebenarnya sudah dilakukan oleh BPJS, tetapi mungkin yang perlu disempurnakan ialah membuat akad tertulis dan jelas antara pihak-pihak yang terlibat.

Wacana pendekatan untuk membuat BPJS Kesehatan sesuai prinsip syariah lalu mengerucut pada dua skema. Pertama, BPJS Kesehatan menyediakan layanan sesuai syariah di samping layanan konvensional yang ada saat ini. Kedua, memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem BPJS Kesehatan. Pilihan pertama berarti BPJS Kesehatan akan memiliki dua jenis layanan (konvensional dan syariah), sedangkan pilihan kedua berarti BPJS Kesehatan akan berubah seutuhnya sesuai prinsip syariah.

Di antara dua pilihan skema tersebut,

penulis berpandangan bahwa pilihan kedua lebih rasional dengan beberapa pertimbangan. Pertama, BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat yang sudah memiliki asuransi kesehatan sekalipun tetap diwajibkan untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu BPJS Kesehatan tidak menghadapi risiko pengurangan pendapatan premi jika berubah seutuhnya sesuai prinsip syariah. Salah satu yang menjadi alasan mengapa kita jarang sekali melihat ada perusahaan asuransi maupun bank yang berubah seutuhnya (konversi) dari konvensional ke syariah yakni lantaran adanya risiko penurunan pendapatan. Bank atau perusahaan asuransi yang akan melakukan konversi takut sebagian nasabah akan berpindah ke perusahaan lain, baik karena mereka tidak suka dengan sistem syariah, maupun karena mereka ragu sebab ketidaktauan mereka tentang sistem syariah. Secara psikologi hal tersebut wajar, sebab manusia pada dasarnya takut akan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Semakin mereka tidak tahu akan sistem syariah, semakin tinggi pendapatan premi akibat peserta yang ragu semacam ini tidak dihadapi oleh BPJS Kesehatan yang bersifat wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kedua, BPJS Kesehatan merupakan institusi yang bertugas memberikan layanan dan tidak mengejar keuntungan. BPJS Kesehatan berbeda dengan perusahaan asuransi BUMN maupun swasta yang harus mengejar target laba dan memiliki pertimbangan yang sangat *rigid* atas tingkat pengembalian dari investasi yang mereka lakukan. BPJS Kesehatan tidak demikian, satu-satunya fokus pertimbangan ketika BPJS Kesehatan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain seperti perbankan yakni kemampuan lembaga keuangan tersebut untuk memberikan layanan seperti yang dibutuhkan BPJS Kesehatan. Sepanjang lembaga keuangan seperti bank syariah mampu memberikan pelayanan yang setara dengan bank konvensional yang selama ini bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan tidak memiliki alasan lain untuk tidak bekerjasama dengan bank syariah tersebut. Hal yang sama berlaku dalam penggunaan instrumen investasi syariah: sepanjang instrumen keuangan syariah yang ada dapat memenuhi kebutuhan BPJS Kesehatan misalnya dari segi keamanan maupun jangka waktu (*tenor*) yang diperlukan, maka BPJS Kesehatan juga tidak memiliki alasan lain untuk tidak menggunakan instrumen investasi syariah tersebut.

Pandangan bahwa BPJS Kesehatan tidak mengejar keuntungan seharusnya juga menjadikan lembaga ini tidak keberatan untuk menghapuskan denda atas keterlambatan pemberdayaan. Jika tujuannya sebagai insentif bagi peserta untuk membayar premi tepat waktu, maka ancaman untuk *lapse* (perlindungan asuransinya hilang) bila telat membayar selama jangka waktu tertentu misalnya 45 hari, sudah cukup untuk menjadi insentif.

Ketiga, konversi seutuhnya dari konvensional menjadi syariah lebih efisien dibandingkan menjalankan dua layanan syariah dan konvensional secara bersamaan. BPJS Kesehatan tidak perlu membuat pemisahan dana antara syariah dan konvensional, tidak perlu memisahkan sumber daya manusia antara konvensional dan syariah, dan tidak perlu membuat administrasi terpisah.

Keberpihakan

Keputusan untuk masuk ke bisnis syariah bagi suatu lembaga keuangan memang selalu menjadi hal dilematis: biaya yang lebih besar jika menjalankan layanan konvensional dan syariah secara bersamaan versus biaya yang lebih murah tetapi berisiko menurunkan pendapatan jika memilih konversi seutuhnya. Dengan pertimbangan laba, hampir semua lembaga

keuangan akhirnya memilih pilihan pertama, yaitu dengan membentuk unit usaha syariah maupun anak usaha syariah. Jarang sekali yang memilih konversi.

Tercatat hanya tiga bank yang melakukan konversi ke syariah dan seluruhnya berbentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang secara ukuran tidak terlalu besar, yaitu BPD Aceh, BPD NTB, dan BPD Sumatera Barat. BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang tidak mengejar laba tetapi fokus pada pelayanan seharusnya memiliki pertimbangan yang berbeda ketika dihadapkan pada pilihan untuk memiliki dual sistem atau seutuhnya konversi ke syariah. Konversi BPJS Kesehatan ke syariah juga akan menjadi sebuah lompatan besar dan bentuk keberpihakan pada industri keuangan syariah seperti yang sejak lama diharapkan oleh pelaku industri keuangan syariah di Indonesia, negara yang 87,2 persen atau 209,1 juta jiwa penduduknya beragama Islam.

**tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja*

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tegal

Tantangan Jadi Peluang untuk Terdepan

Program *good governance* menumbuhkan harapan masyarakat dan *stakeholders* akan pelayanan yang lebih baik. KPKNL Tegal di bawah Kementerian Keuangan, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah di bidang pengelolaan kekayaan negara dan penyelenggara lelang, dengan antusias mengimplementasikan nilai tersebut di lingkungannya.

Tak bisa dipungkiri, masyarakat menginginkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel. Tidak mudah memang, terlebih birokrasi pemerintahan terlanjur dicap negatif oleh khalayak umum. Namun itulah tantangan yang harus dijawab oleh kantor-kantor plat merah, terkait upaya mengubah paradigma masyarakat yang sudah terlanjur buruk.

”Yang terpenting adalah mengubah mindset birokrat zaman *old* menjadi birokrat zaman *now* yang berorientasi melayani yang sebenarnya bisa kita dapat dari Nilai-Nilai Kementerian Keuangan,” ucap Dwi Hariyanto, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, membuka sesi wawancara siang itu. Untuk mendukung usaha tersebut, seluruh jajaran di kantor dengan dukungan 32 staf ini terus melakukan internalisasi budaya organisasi yang mendukung perubahan tersebut.

Agar memudahkan proses pengimplementasian nilai-nilai yang telah dipelajari, KPKNL Tegal menetapkan tiga pilar utama pelayanan berupa transparansi informasi, fasilitas pendukung yang representatif, dan inovasi. Ketiga faktor tersebut harus terpenuhi dan berjalan

berkesinambungan. Seluruh informasi terkait layanan disediakan melalui berbagai saluran, baik konvensional maupun digital. Guna mendukung jalannya pelayanan, dibangun fasilitas pendukung seperti ruang pelayanan terpadu, e-Auction corner, ruang konsultasi dan ruang pendukung lainnya yang nyaman dan representatif. Terakhir dan tak kalah penting, beberapa inovasi khususnya yang berbasis teknologi informasi diciptakan untuk mempercepat dan memudahkan layanan.

Kantor berwawasan layanan

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai KPKNL Tegal dalam menjadi kantor berwawasan pelayanan berbuah manis. Dalam Upacara Peringatan Hari Oeang ke-72 pada 30 Oktober 2018 silam di Lapangan Banteng, nama kantor ini dipanggil untuk menerima penghargaan Kantor Pelayanan Terbaik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Prestasi tertinggi bagi kantor layanan di lingkungan Kementerian Keuangan itu diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kepala kantor ini mengaku bangga, namun juga tidak menyangka bahwa kantor yang ia pimpin berhasil mendapat

predikat bergengsi tersebut. Pasalnya, ia baru diberi amanah menjadi pemimpin KPKNL Tegal medio akhir 2017 dan langsung diberi arahan untuk mengikuti lomba kantor pelayanan terbaik. Namun, beban tersebut tak dijadikannya penghambat justru menjadi motivasi bagi dirinya dan seluruh jajarannya untuk segera berbenah makin baik. ”Saya beruntung karena disambut hangat dan mendapat dukungan penuh dari seluruh staf yang berkomitmen tinggi di sini,” tukas pria yang akrab dipanggil Dwi ini penuh syukur.

Keunggulan KPKNL Tegal selain karena dukungan seluruh pimpinan dan staf yang sangat berdedikasi mendukung transformasi birokrasi, juga terletak pada inovasi pendukung yang memudahkan kedua belah pihak. Untuk internal, diciptakan inovasi bernama CANGKIR (baca, monitoring kinerja). Dari aplikasi tersebut, pimpinan dapat memonitor target dan realisasi dari tiap seksi setiap harinya. Untuk memudahkan administrasi, SIPETUALANG (sistem informasi penata usaha risalah lelang) hadir memudahkan pendokumentasian risalah lelang sehingga memudahkan proses pencariannya jika dibutuhkan nantinya. Selain itu, masih



Kantor KPKNL Tegal

Apel pagi rutin diadakan untuk memompa semangat seluruh pegawai

Dwi Hariyanto berpose memegang piagam Kantor Pelayanan Terbaik didampingi seluruh stafnya

Foto Anas Nur Huda

Foto Dok. KPKNL Tegal

ada SIMPAN (sistem informasi penatausahaan piutang negara) dan bahkan ada SIDEA, yang memudahkan bagian umum dalam pengelolaan ketersediaan barang.

Setelah berhasil mensimplifikasi proses bisnis secara internal, langkah berikutnya yang harus ditempuh adalah menghadirkan inovasi yang ditujukan untuk pengguna layanan. Aplikasi tersebut diberi nama SEMPOLAN (sistem informasi permohonan lelang). ”Jadi dari sana pun dia bisa memonitor permohonan dia, apakah lengkap datanya, terus dia tahu nantinya kapan lelangnya ditetapkan tanggal berapa. Atau pun tidak lengkap, dia harus mengirimkan kelengkapan,” jelas Dwi. Ia menambahkan bahwa pihaknya juga membuat kebijakan terkait SOP layanan, yang semula maksimal 15 hari dipangkas menjadi 12 hari saja.

Sebayu, semangatku untuk maju

Dalam menggelorakan semangat untuk terus berproses menjadi lebih baik, para punggawa kekayaan negara ini memiliki motonya tersendiri. ”Sebayu Semangatku! Sebayu itu kami ambil dari nama pendiri pemerintahan Tegal di abad ke-16. Dari nama tokoh legendaris itu kami ciptakan akronim,” terang Dwi bersemangat. Sebayu merupakan abreviasi dari sinergi, efisien dan efektif, berbudaya, amanah, yuridis dan unggul.

Nilai-nilai luhur yang dimiliki kantor ini tak hentinya selalu digemakan, salah satunya tiap apel pagi yang rutin diadakan tiap harinya. Kebiasaan tersebut menghasilkan semangat yang membantu seluruh jajaran di kantor ini dalam melewati tahun 2018 lalu yang cukup menantang. Selain dinominasikan sebagai kantor pelayan terbaik, di tahun yang sama KPKNL Tegal juga diikutkan penilaian Zona Integritas WBK/WBM dan juga memiliki tanggung jawab untuk meraih ISO 9001/2015. ”Insyaallah kalau



sudah diberi amanah, kita bersama-sama dapat menerima dengan penuh tanggungjawab. Ya artinya ada niat bahwa kita harus dapat!” seru pria asal Purwokerto ini mantap.

Keseriusan KPKNL Tegal ini kembali membuahkan hasil ketika akhirnya sertifikat ISO 9001/2015 berhasil dikantongi. Penghujung 2018 pun berhasil ditutup dengan manis ketika kantor ini berhasil menyabet predikat Zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Seluruh prestasi ini merupakan wujud komitmen pimpinan dengan dukungan staffnya mengubah tantangan menjadi peluang untuk selalu terdepan. ”Orang Tegal memiliki istilah laka-laka! Artinya itu tiada duanya, bukan berarti kami ingin menjadi beda. Kata tersebut kami beri makna baru yaitu ’layanan kami lancar *kabeh*’ (red: semua), sebagai jaminan pelayanan kami bagi pengguna layanan,” pungkasnya.

Teks Dimach Putra

Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Peramu Strategi Desentralisasi

Meramu strategi bukan semata perkara mencapai tujuan tertentu secara mangkus dan sangkil. Meramu strategi juga perkara meraup informasi dan data seoptimal mungkin. Layaknya meramu kudapan, sebelum berwujud klepon atau putu, juru masak perlu memikirkan kelapa dan gula merah macam apa yang akan diolah. Setelahnya, ia akan mengolah bahan-bahan itu dan memikirkan kembali tentang bagaimana menyajikan. Demikian pula dengan Kurnia, Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD) pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Ia adalah juru masak bagi data-data keuangan pusat dan daerah untuk diolah menjadi strategi untuk penentuan kebijakan terkait desentralisasi fiskal. Memilah data, mengolahnya dengan sains, sampai menyuguhkan kajian desentralisasi fiskal

yang kredibel adalah tanggung jawabnya.

Upaya Mengikis Kesenjangan

Perihal pembentukan Jabatan Fungsional AKPD, pria yang sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah ini mengatakan bahwa itu adalah upaya mengikis kesenjangan pengelolaan keuangan pusat dan daerah. “Ya hubungan keuangan pusat dan daerah ini kan dinamikanya tinggi gitu ya. Dana transfer juga semakin tinggi, di daerah dinamikanya juga tinggi,” tuturnya. Ia melanjutkan, “Dari sanalah kemudian lahir pemikiran untuk ada orang-orang yang memang profesional di situ, fokus di pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah”. Jabatan fungsional AKPD yang dibentuk pada 2014 ini diharapkan dapat meningkatkan harmoni dan kredibilitas

pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Hasil kajian dari AKPD juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mendukung terciptanya kebijakan-kebijakan yang berbasis riset. Sampai saat ini, peminat jabatan fungsional AKPD yang telah melalui uji kompetensi diperkirakan mencapai 400 orang yang tersebar baik di instansi pusat maupun daerah.

Keberadaan AKPD di pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi gejolak saat terjadi perubahan kepemimpinan. Sebelum adanya jabatan fungsional AKPD, pengelola keuangan di daerah cenderung rentan terhadap perubahan mengikuti dinamika politik daerah setempat. Makin banyaknya peminat AKPD diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik di instansi pusat maupun daerah.

Sejatinya setiap rupiah dalam pengelolaan keuangan negara diupayakan untuk memiliki dampak optimal saat diterima masyarakat. AKPD dalam hal ini berperan untuk mendukung kebijakan melalui kajian-kajian terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan. Upaya ini tentu saja berujung pada cita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Nanti diharapkan ujung-ujungnya dana yang ditransfer dari pusat ke daerah akan berdampak sangat signifikan bagi pelayanan publik maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” kata alumni kebijakan publik KDI School Public Policy and Management ini.

Siaga dan Sinergi

Setiap awal tahun, Kurnia dan sejawat AKPD akan mempersiapkan kontrak berisi rencana kajian yang akan ditandatangani bersama pimpinan unit kerja. Selain mempersiapkan kajian yang telah direncanakan sebelumnya, AKPD juga mesti siap sedia atas permintaan kajian untuk situasi-situasi tertentu. “Misalnya isu pemindahan ibu kota negara. Ini perlu dikaji. Kira-kira ada *nggak* dampaknya terhadap hubungan keuangan pusat dan daerah,” katanya. “Atau misalnya bencana. DJPK akan menyiapkan strategi pembiayaan bencananya. Dampaknya dari (sudut pandang) APBN seperti apa, dampaknya dari APBD seperti apa,” ia melanjutkan.

AKPD harus selalu mampu berdiri di kedua sudut pandang. Sebab ia berkewajiban meramu harmoni pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Ia mesti mengerti



Kurnia, S.S.T.,Ak., M.P.P., Analis Keuangan Pusat dan Daerah DJPK



AKPD melakukan penyusunan Standar Harga Regional

Foto Anas Nur Huda dan dok. pribadi

bagaimana gelisah pengelolaan keuangan daerah, ia pun mesti teliti atas pemanfaatan keuangan pusat. Untuk membangun kepekaan dan kepedulian atas kesenjangan pengelolaan keuangan, Kementerian Keuangan secara rutin menggelar diklat Analis Keuangan Pusat dan Daerah. “Itu biasanya teman-teman pusat dan daerah selalu digabung. Di situ kelihatan *angle* pusat seperti apa, daerah seperti apa,” katanya. Kesempatan seperti itu yang dimanfaatkan oleh Kurnia dan sejawatnya untuk menyelaraskan pemahaman tentang desentralisasi fiskal. “Setelah diklat *gitu*, akhirnya teman-teman memiliki pemahaman dan cara pandang yang relatif sama,” katanya menutup.

Selain itu, untuk meningkatkan sinergi antar AKPD, Kurnia mengatakan bahwa AKPD dapat melakukan penelitian bersama. Masing-masing AKPD bisa

bergabung untuk mengkaji permasalahan yang sama, lantas nanti hasilnya digunakan sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Ia mencontohkan dengan kasus pengelolaan sampah. “Misalnya di Kota Bekasi yang jadi tempat pembuangan akhir untuk sampah-sampah dari Jakarta. Itu kan *udah* antar daerah tuh. Atas dampak ini, harus ada pemikiran bagaimana pendanaan antardaerah untuk memitigasi masalah yang terjadi nanti di masyarakat,” katanya mengilustrasikan. “Bisa jadi pemikiran nanti, apa peran pusat? Itu kan bisa dikaji bareng,” ia menjelaskan.

Sebagai AKPD, Kurnia beberapa kali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data. Adanya keterbatasan data tentu akan berpengaruh pada kualitas kajian yang bisa dihasilkan. Belum lagi dengan adanya keterbatasan waktu. Tentu keterbatasan seperti ini akan mempengaruhi rekomendasi yang dapat dihasilkan. Ia berharap keterbukaan data saat ini akan lebih memudahkan pekerjaannya untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas sehingga dapat mendukung terwujudnya kebijakan yang berkualitas pula.

Teks A. Wirananda

Strategi desentralisasi fiskal turut menentukan keberhasilan fiskal daerah

Foto Anas Nur Huda

Pendalaman Pasar Keuangan, Pemerintah Turunkan Nilai Penawaran *Private Placement* Surat Utang Negara

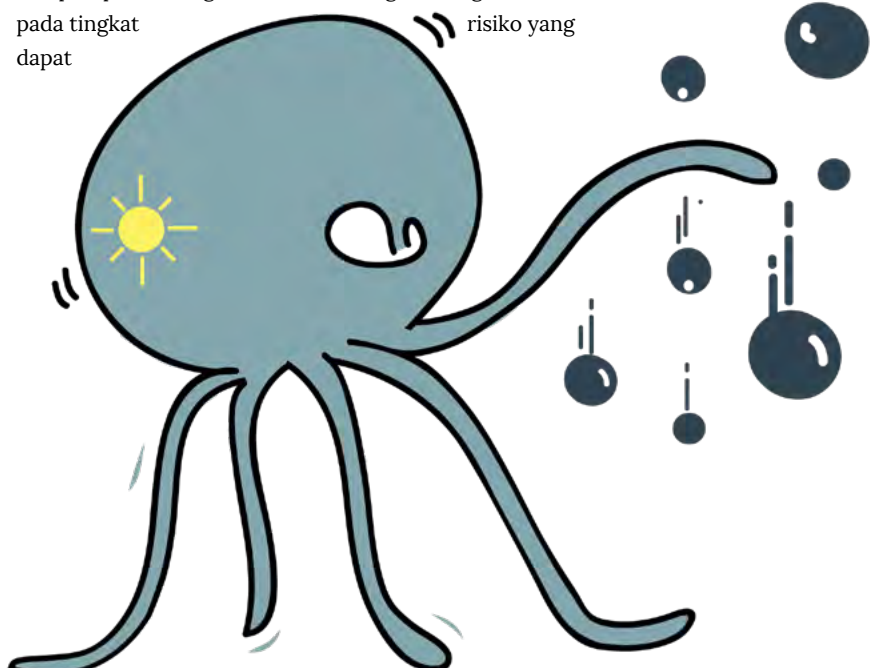
Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Domestik dengan Cara *Private Placement*

Pemerintah menerapkan berbagai strategi untuk memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam mendorong terwujudnya kemandirian pembiayaan dalam negeri dan pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) serta perluasan basis investor domestik, salah satunya dapat dilakukan melalui penjualan SBN Ritel dan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dengan cara *private placement*. Dalam kacamata investor, dengan banyaknya alternatif jenis instrumen pembiayaan negara, menjadikan jenis investasi lebih beragam. Sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelaksanaan penjualan SUN di pasar perdana domestik dengan cara *private placement*, Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai penerbitan SUN. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Domestik dengan Cara *Private Placement*. PMK ini merupakan penyempurnaan dari PMK Nomor 118 Tahun 2015 tentang penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Domestik dengan Cara *Private Placement*. Dengan

berlakunya PMK Nomor 51/PMK.08/2019, maka PMK Nomor 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik dengan Cara *Private Placement* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perluas Jangkauan Pasar Domestik

Penjualan SUN dengan cara *private placement* adalah transaksi SUN yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak tertentu secara bilateral, dengan ketentuan dan persyaratan SUN sesuai kesepakatan. Penjualan SUN di pasar domestik melalui *private placement* memiliki beberapa tujuan. Pertama, sebagai upaya untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang strategis dan prospektif dengan tingkat bunga terbaik pada tingkat risiko yang dapat



ditoleransi dalam pengelolaan APBN. Kedua, untuk memperluas jangkauan pelaksanaan penjualan SUN di pasar perdana domestik.

Dalam pembelian SUN dengan cara *private placement* di pasar perdana domestik, residen dapat membeli SUN dalam mata uang rupiah atau dalam valuta asing. Yang termasuk dalam kategori residen yaitu orang perseorangan warga negara Indonesia di manapun mereka bertempat tinggal, perusahaan atau usaha bersama baik Indonesia ataupun asing yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Layanan Umum di bawah pembinaan Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan/atau Dealer Utama. Pihak selain residen hanya dapat membeli SUN dalam mata uang rupiah. Pembelian SUN dengan cara *private placement* harus dilakukan melalui Dealer Utama, kecuali Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah dan Dealer Utama yang dapat membeli SUN melalui Dealer Utama maupun secara langsung kepada Pemerintah tanpa melalui Dealer Utama.

Jumlah Minimal Penawaran Turun

Penawaran pembelian SUN dalam mata uang rupiah dapat diajukan oleh Bank Indonesia, OJK, LPS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah atau Dealer Utama. Selain dalam mata uang rupiah, residen juga dapat mengajukan penawaran pembelian SUN dalam valuta asing kepada pemerintah. Untuk nominal penawaran SUN dan minimal nominal untuk satu seri dalam mata uang rupiah dan valuta asing tercantum dalam PMK Nomor 51/PMK.08/2019. Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1), jumlah minimal nominal Penawaran Pembelian SUN dalam mata uang rupiah sebesar Rp250 miliar, dengan minimal nominal untuk satu seri sebesar Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya.

Ketentuan ini menurunkan batas minimal penawaran pembelian SUN dengan cara *private placement* dalam mata uang Rupiah, yaitu senilai Rp300 miliar untuk satu seri.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa minimal nominal penawaran pembelian SUN dalam valuta asing yang dapat diajukan kepada Pemerintah oleh residen adalah sebesar US\$25 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain, dengan minimal nominal untuk 1 (satu) seri sebesar US\$1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya. Nilai ini lebih rendah dari aturan sebelumnya yang dipatok sebesar minimal US\$50 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain untuk satu seri.

Jika penawaran pembelian SUN dalam valas dilakukan dalam mata uang selain dolar Amerika Serikat (AS), maka perhitungan batasan minimal untuk menentukan ekuivalen mata uang asing lain dengan mata uang dolar AS mengacu pada rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dalam lima hari terakhir sebelum tanggal surat penawaran.

Selain menurunkan jumlah minimal penawaran, terdapat ketentuan tambahan yaitu pengecualian minimal nominal baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk beberapa tujuan. Ketentuan batas bawah penawaran dikecualikan apabila pemerintah mempertimbangkan untuk memenuhi kewajiban investasi pada SBN, langkah pendalaman pasar keuangan, dan perluasan basis investor domestik. Namun demikian, untuk pengajuan penawaran pembelian SUN kepada Pemerintah tetap per seri sebesar Rp10 miliar dan berlaku kelipatannya (untuk denominasi rupiah), dan per seri sebesar US\$1 juta atau ekuivalen dengan mata uang asing lain dan berlaku kelipatannya (untuk valuta asing).

Penjualan SUN dengan cara *private placement* dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk pemenuhan kas akhir tahun. Nominal yang disepakati dalam pembahasan Penjualan SUN dengan cara

private placement untuk pemenuhan kas akhir tahun berupa batas maksimal SUN yang akan diterbitkan dan dituangkan dalam dokumen kesepakatan. DJPPR dapat menerima seluruh, sebagian, atau membatalkan hasil kesepakatan yang terdapat dalam dokumen kesepakatan dengan pertimbangan realisasi terkini APBN.

Untuk setelmen penjualan SUN dengan cara *private placement* dilakukan paling lambat 5 hari kerja (T+5) setelah tanggal kesepakatan. Dalam hal penjualan SUN dengan cara *private placement* dilakukan untuk memenuhi kewajiban investasi pada SBN, langkah pendalaman pasar keuangan, dan perluasan basis investor domestik maka setelmen dapat dilakukan lebih dari 5 hari kerja setelah tanggal kesepakatan *pp* dan dalam hal setelmen, Bank Indonesia, OJK, LPS, BPJS, BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, atau Dealer Utama tidak menyerahkan dana sampai dengan batas akhir tanggal setelmen, dapat dikatakan bahwa penjualan SUN dengan cara *private placement* dinyatakan batal.

Penutup

Penerbitan SUN dengan cara *private placement* merupakan salah satu strategi dalam rangka memenuhi target dalam menutup defisit APBN 2019. Penerbitan SUN dengan cara *private placement* merupakan salah satu pilihan metode penerbitan SBN dan dalam pelaksanaannya seluruh transaksi SUN dengan cara *private placement* menjadi diskresi Pemerintah untuk menerima atau menolak tawaran yang masuk berdasarkan pertimbangan pengelolaan portofolio SUN, kondisi pasar SUN dan posisi kas Pemerintah. Melalui penyempurnaan PMK tersebut, Pemerintah menjaga *good governance* dengan menerapkan rambu-rambu yang tegas terhadap penerbitan SUN melalui *private placement* agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Teks Akhsan Akbar & Budi Sulistyono

Hadirkan Keajaiban Teknologi di Dunia Pendidikan

Hardika Dwi Hermawan saat kelulusannya di HKU

Foto dok. Pribadi



lpdp Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Gedung Danadyaksa Cikini
Jl. Cikini Raya no. 91 A-D Menteng
Telp/Faks. 1500652
E-mail. lpdp@depkeu.go.id
Twitter/Instagram. @LPDP_RI
Facebook. LPDP Kementerian Keuangan RI
Youtube. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP RI

Menghadirkan kegiatan belajar mengajar yang menarik dan mengasyikkan tidaklah mudah. Terlebih, di era digital seperti sekarang. Beruntung, Indonesia masih memiliki pemuda yang perhatiannya terhadap inovasi teknologi di bidang pendidikan begitu tinggi.

Dialah Hardika Dwi Hermawan atau yang akrab disapa Dika. Baginya, belajar memang harus menyenangkan. Itu sebabnya, Dika menekuni pengembangan media

pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI). Diantaranya menghadirkan keajaiban teknologi *augmented reality* (AR) dan *virtual reality* (VR) sebagai media belajar.

Alasan dibalik cerita

Dika meyakini perubahan zaman menuju era digitalisasi perlu diimbangi dengan ketersediaan para ahli TI di bidang pendidikan. Dia menuturkan, pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, khususnya di Indonesia, masih kurang. Padahal,

dampaknya terhadap kualitas pembelajaran begitu baik.

“Banyak sekali ahli *sci-tech* (*science and technology*) dari Indonesia. Namun, masih sedikit yang fokus pengembangannya di bidang pendidikan. Saya ingin menjadi bagian dari (yang sedikit) itu,” ungkap pemuda lulusan Master of Science di bidang Information Technology in Education di University of Hongkong (HKU) ini.

Pemilihan University of Hongkong diakuinya telah melalui pertimbangan

matang. Itu sebabnya, meski telah mengantongi tujuh Letter of Acceptance (LoA) dari berbagai kampus di Eropa, Asia, maupun Australia, Dika tetap berteguh hati. “Course dan program yang ditawarkan di HKU lebih cocok dan sesuai dengan bidang yang ingin saya kembangkan,” ungkap penerima *awardee* Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini.

Aneka kreasi

Beberapa hasil kreasi Dika bersama tim dibuat guna meningkatkan gairah dunia pendidikan Indonesia. Sebut saja ARBook Sejarah Indonesia, Batik Detector, Game Visit Indonesia Quis, Aplikasi Keragaman Indonesia, AR-Topeng, AR-Card, dan lain sebagainya.

Aplikasi ARBook Sejarah Indonesia dibuat dengan pendekatan teknologi *augmented reality*. Teknologi ini memungkinkan gambar pada buku sejarah bisa bergerak dan menjelaskan peristiwa sejarah yang terjadi. Diakui Dika, aplikasi ini telah digunakan di SMP Negeri 3 Mrebet, Jawa Tengah.

Sementara Batik Detector hasil kreasi Dika bersama tim, telah memperoleh hak paten HaKI (Hak atas Kekayaan Indonesia). “Aplikasi akan menampilkan video penjelasan yang muncul pada batiknya,” jelas Dika. Uniknya, aplikasi ini mampu meningkatkan minat dan ketertarikan para generasi muda, termasuk anak-anak, untuk mau belajar lebih jauh mengenai batik dan filosofinya. Diceritakan Dika, Aplikasi Batik Detector berhasil dipublikasikan dalam The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

“Mengembangkan produk yang bisa bermanfaat adalah sebuah kesenangan. Saya tak pernah menyangka bahwa produk saya akan menjadi juara Nasional, dipublikasi pada artikel terindeks scopus, dipresentasikan pada forum internasional, mendapatkan HaKI dan juga penghargaan ditingkat Internasional,” ungkapnya.

Karena cinta

Kecintaan Dika pada dunia pendidikan sudah sejak lama dia rasakan. Semasa duduk

di bangku sekolah menengah pertama (SMP), Dika pernah membuat perpustakaan dari bambu. “Sebelum membangun perpustakaan itu, saya dan orang tua harus menebang bambu di kebun, menabung, dan mengumpulkan uang untuk membeli buku bacaan agar bisa menambah koleksi,” kenangnya dengan mata berbinar.

Semangat berkompetisi juga sudah sejak lama dia miliki. Selama menjalani pendidikan sarjana, Dika telah mengikuti tidak kurang dari 35-40 kompetisi dan perlombaan. Pada awalnya, kekalahan lebih sering dia alami. Namun selanjutnya, kemenangan bertubi-tubi justru datang menghampiri, mulai dari juara pertama tingkat nasional hingga sebatas finalis.

“Dari proses panjang itu, saya berpikir bahwa kegiatan lomba, konferensi, atau apapun yang disebut orang sebagai simbol prestasi sebenarnya hanyalah demi memberi manfaat yang lebih banyak untuk kehidupan sekitar kita. Bukan untuk kebanggaan diri sendiri karena di situ kita juga butuh kerja sama tim yang punya peran penting masing-masing,” pesan Dika.

Kerja keras tak mengkhianati hasil

Upaya memperoleh beasiswa LPDP bukan tanpa tantangan. Dika perlu menguatkan hati menjalani tes TOEFL di Jakarta pada hari yang sama dengan operasi pengangkatan tumor sang ibu. “Alhamdulillah skor saya di atas target dan sangat cukup untuk mendaftar LPDP,” kisahnya. Beruntung, kesehatan sang ibu juga berangsur membaik.

Berhasil masuk University of Hongkong bukan berarti perjuangan selesai. Hongkong dikenal sebagai salah satu kota termahal di dunia. Keteguhan Dika lagi-lagi diuji. Sebab living allowance (LA) yang diperoleh dari LPDP kurang bisa mencukupi kebutuhannya.

Dika harus rela tinggal di kamar sempit bersama para pekerja malam dari Filipina. “Saya tinggal di kamar ukuran 2x1 meter persegi seharga Rp6,5 - 7 juta per bulan. Waktu itu, uang beasiswa sekitar Rp11juta per bulan,” kisahnya.

Dengan keterbatasan ruang kamar, Dika

bahkan perlu duduk untuk sholat karena jarak tempat tidur dengan atap kamar hanya satu meter. Dika juga menghindar untuk melakukan *video call* dengan sang ibu agar tidak membuat khawatir. Namun setelah tahu, sang ibu memaksanya pindah ke tempat yang lebih baik dengan menjual sapi-sapi mereka.

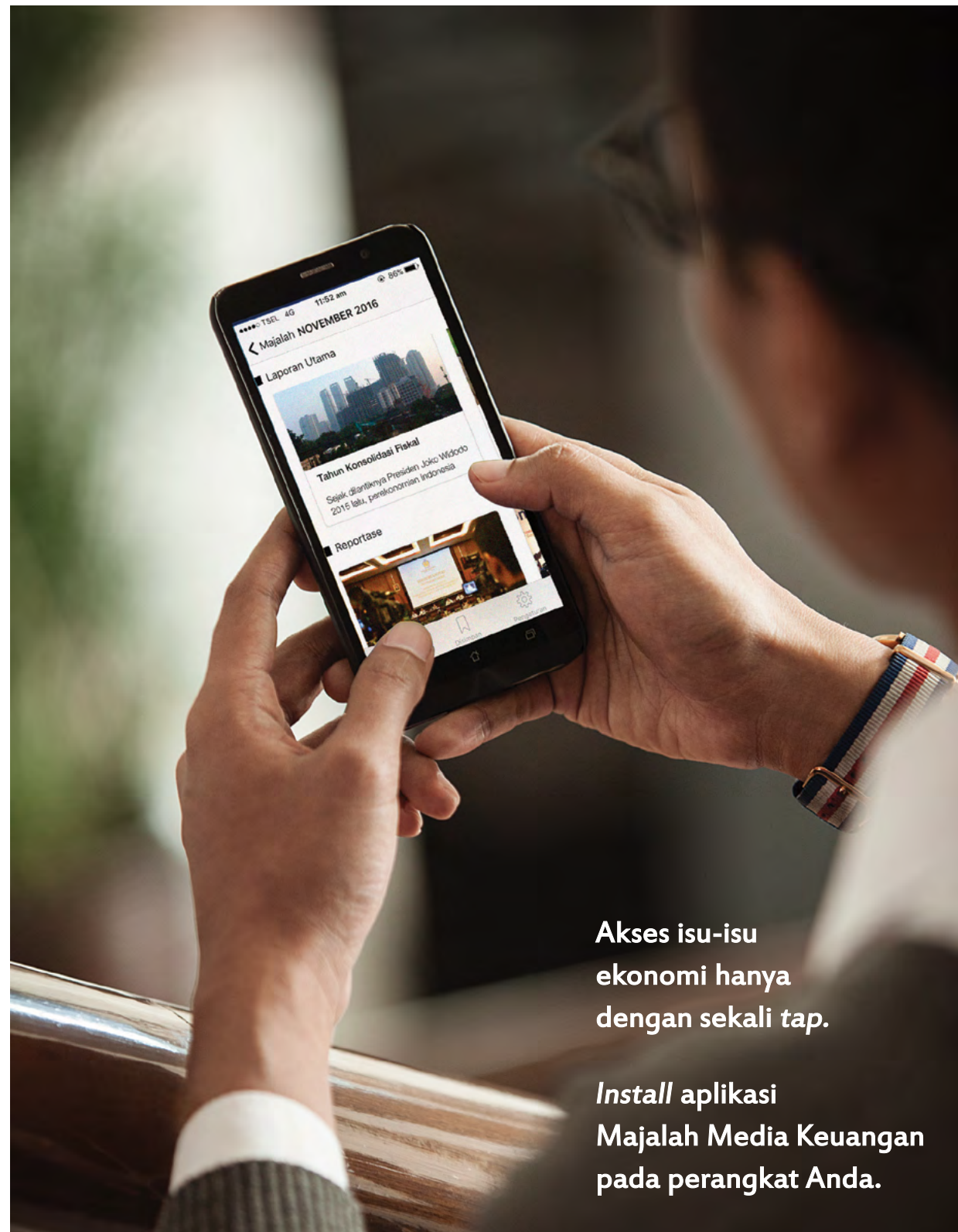
Diceritakan Dika, dirinya telah mengajukan permintaan tambahan kenaikan LA kepada LPDP. Namun, prosesnya perlu menunggu hingga tahun berikutnya. “Saya menerima semua itu sebagai bagian dari konsekuensi, perjuangan, dan rencana terbaik Allah,” tuturnya.

“Saya menjadi sangat produktif dan dapat lulus tepat waktu, mendapatkan dua *silver medals* pada International Innvention and Innovative Competition, menjadi presenter di tujuh Konferensi Internasional di luar negeri, menambah lima publikasi terindeks scopus, tiga lainnya sudah *accepted* tahun lalu dan menunggu publish, serta memperoleh dua HaKI,” ungkapnya. Beruntung setelahnya, LA dari LPDP mengalami kenaikan, sehingga Dika bisa mengalokasikan kebutuhannya dengan lebih baik.

Setelah lulus, Dika bersama dua rekan LPDP membentuk *start up* bernama Jawara Edu Training and Consulting (JETC). “Untuk merawat optimisme anak muda, menghubungkan *trainer-trainer* dengan berbagai lembaga dan organisasi, serta aktif dalam memberikan pelatihan dan berpartisipasi dalam hal positif untuk memajukan Indonesia,” terangnya.

Dika juga tergabung dengan Eduraya Technology yang berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis AR. Nantinya, Dika bersama 11 rekan alumni LPDP berencana mengadakan Karimun Jawa Summit 2019. “Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk sebuah wadah bersama, membuat *roadmaps*, serta bentuk timbal balik kami sebagai penerima beasiswa LPDP agar Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan bermartabat,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi



Akses isu-isu ekonomi hanya dengan sekali tap.

Install aplikasi Majalah Media Keuangan pada perangkat Anda.



@majalahmediakeuangan



Foto
Anas Nur Huda

Ilustrasi
A. Wirananda

Waspada! Bukan Batuk Biasa

dr. Rizki Dinar E.
(Balai Kesehatan Kementerian Keuangan)

Batuk lumrah dialami setiap orang. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau reaksi alergi. Namun, jika batuk berkepanjangan meski sudah diberi obat dan antibiotik, kita perlu waspada. Bisa jadi batuk tersebut bukan batuk biasa, melainkan tuberkulosis (TB) paru.

Selaku negara endemis TB, batuk berjangka panjang di Indonesia patut diwaspadai sebagai TB paru. Cara terbaik untuk mengetahuinya yakni dengan berobat ke dokter dan melakukan pemeriksaan laboratorium tambahan, berupa pemeriksaan dahak, ludah, serta rontgen paru. Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* sebagai penyebab TBC paru

sebenarnya tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga menyerang tulang, kelenjar limfa, kulit, dan anggota tubuh lainnya. Akan tetapi, kejadian tertinggi TB ada pada TB paru.

Indonesia mewajibkan vaksin TB mengingat tingginya jumlah kasus setiap tahun. Vaksin BCG diberikan setelah bayi lahir hingga berusia 3 bulan untuk memberikan kekebalan hingga ia dewasa. Penyakit ini sangat menular melalui dahak dan cairan liur.

Penderita biasanya batuk terus-menerus lebih dari dua minggu. Ia tampak lemah, kurus, kehilangan nafsu makan, demam menggigil, serta berkeringat pada malam hari. Dalam kondisi parah, dapat dijumpai

bercak darah kemerahan pada batuk. Perlu diingat, ketika terjadi batuk berdarah, area tenggorokan tidak mengalami perlukaan seperti pada batuk alergi dan kanker nasofaring. Bercak darah pada batuk TB muncul akibat perlukaan di area paru-paru. Namun demikian, ada juga TB paru yang tidak menimbulkan batuk, misalnya TB paru non-aktif atau TB paru yang tidak menular.

Pasien TB tetap bisa sembuh total. Peluangnya mencapai 99 persen bila obat diminum secara rutin selama enam bulan berturut-turut. Bakteri TB di dalam paru-paru akan melemah dan mati jika pasien mengonsumsi obat dengan benar. Jika sebaliknya, kuman hanya melemah dan kembali kambuh beberapa minggu kemudian dengan gejala yang makin serius. Kuman pun kebal terhadap antibiotik TB yang diberikan. Dalam kasus seperti itu, jangka waktu pengobatan ditingkatkan hingga 9-12 bulan dan generasi obat diganti menjadi lebih tinggi.

Meski TB bisa disembuhkan, bukan berarti kondisi paru-paru dapat kembali seperti semula. Infeksi TB mengakibatkan perubahan fungsi paru-paru dalam jangka panjang. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) merupakan salah satu bentuk komplikasi TB. Penderitanya akan merasa sesak meski kuman TB sudah tidak terdeteksi. Saat pasien melakukan rontgen, maka akan terlihat bercak putih yang menetap. Hal ini bukan berarti infeksiya masih berlangsung, tetapi semata-mata menunjukkan adanya jaringan parut di paru-paru akibat infeksi TB sebelumnya.

Keterburuan yang Menyakiti

Foto
Anas Nur Huda

Pagi itu di sebuah stasiun, seorang ibu tua menangis. Kedua tangannya gemetar. Baru kali ini ia bepergian sendiri dengan *commuter line*. Namun, saat akan turun di stasiun tujuannya, orang-orang muda berebut naik kereta, tanpa memberikan kesempatan baginya untuk lewat lebih dulu. Badan rentanya terjepit di antara kerumunan. Ibu tua itu hanya bisa menangis pasrah. Dia tak mampu bersaing melawan kerumunan manusia yang berangkat mencari nafkah, bersama dunia yang tergesa.

Pada tempat berbeda, aneka kendaraan berbaris memanjang, diiringi bunyi klakson bersahut-sahutan. Bersama asap kendaraan yang mengepul hitam, sejumlah teriakan atau bahkan umpatan sampai ke telinga. Tak peduli pada siapa kata-kata kasar disampaikan, yang penting amarah tersalurkan. Sementara yang lain hanya bisa mengelus dada, saat menghadapi orang-orang yang diburu sampai tujuan tepat waktu.

Keterburuan tak luput hadir dalam keseharian kita. Saat pagi hendak berangkat ke kantor, misalnya, kita tergesa hingga tak sempat memberikan senyuman terbaik kepada keluarga di rumah. Saat tiba *deadline* tugas dari atasan, kita terburu menyelesaikan. hingga tak sempat menyapa hangat rekan sebelah meja. Saat tiba waktu menghambra pada Yang Kuasa, kita terburu ingin segera menuntaskan ibadah, hingga tak sempat menyampaikan doa dan syukur kepada-Nya. Bahkan sesederhana saat melalang buana di media sosial, kita terburu melempar komentar, hingga tak sempat memikirkan perasaan orang.

Pada zaman yang serba cepat ini, keterburuan seolah jadi keharusan. Keterburuan tak berhenti menghantui pikiran dan hati kita. Padahal cepat tak berarti harus terburu-buru. Buru-buru menjadikan diri kita suka menuntut. Buru-buru lulus, buru-buru menikah, buru-buru beli rumah, buru-buru punya anak, buru-buru jadi kaya, dan tuntutan buru-buru

lainnya.

Buru-buru adalah pembenaran yang sering kita sampaikan. Kepada orang lain yang tidak kita kenal, kepada teman, kepada keluarga, juga kepada diri kita sendiri. Buru-buru membuat kita ingin dimaklumi atas kesalahan maupun kekhilafan. Disadari atau tidak, keterburuan kita, seringkali justru menyakiti. Bisa jadi, ada hak yang tidak kita penuhi saat kita terburu melakukan sesuatu. Buru-buru membuat kita berpikir tanpa menyadari, berkata tanpa meresapi, dan bertindak tanpa memahami.

Ada saatnya kita harus berhenti sejenak untuk memberikan ruang pada hati. Menelisik kembali, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Menimbang mana yang patut dan mana yang tidak patut. Agar kita tak lagi menjadi pelaku dari keterburuan yang menyakiti, baik bagi orang lain maupun diri kita sendiri.

Teks Reny Henriyani

Sarwono: Lelaki Hujan Bulan Juni

Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni
Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu

Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni
Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu

lulah sepenggal puisi karya Sapardi Djoko Damono atau yang lebih akrab disapa dengan SDD yang ada di novel trilogi Hujan Bulan Juni. Novel yang menceritakan tentang kisah Sarwono, seorang dosen sekaligus pengisi tetap koran Swara Keyakinan. Sarwono dikenal sebagai seorang dosen yang pintar, bersuku Jawa, dan sedang jatuh cinta dengan temannya yang bernama Pingkan yang berasal dari Manado. Mereka mempercayai bahwa kasih sayang tak lain adalah kitab suci, yang tanpa kertas, tanpa aksara, tanpa surah. Bahwa kasih sayang beriman pada senyap. Sarwono meyakini bahwa cintanya kepada Pingkan adalah takdir dan bukan sekedar nasib. Takdir tidak bisa diubah, nasib tergantung kepada usaha manusia.

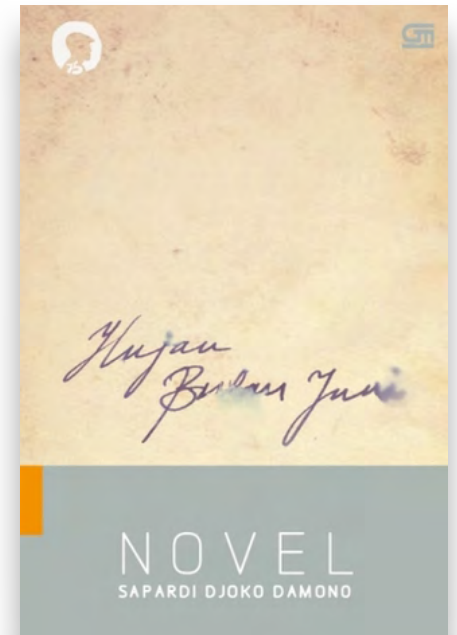
Sarwono dan Pingkan berbeda agama dan membuat mereka seringkali khawatir tidak bisa menyesuaikan diri terutama dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Kekhawatiran itu tidak keliru sepenuhnya. Sebagai anak tunggal, Sarwono selalu dituntut orang tuanya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan. Ia sendiri khawatir jika hubungannya dengan Pingkan yang

berbeda suku diketahui oleh keluarga besar Pingkan.

Kisah konflik romansa juga diwarnai dengan kecemburuan Sarwono karena keberangkatan Pinkan ke Jepang yang lebih cepat, bahkan Sarwono pernah berfikir untuk melepaskan saja cita-citanya sebagai dosen dan berganti bekerja di koran atau media apa saja. Dia pun merasa sebenarnya itulah yang ia cita-citakan sebab ia merasa bebas dan sejalan dengan janjinya dulu kepada dirinya sendiri untuk tidak bergantung kepada orang tuanya.

Novel Hujan Bulan Juni menceritakan kisah ketulusan perjuangan cinta yang sering kita temui di lingkungan kita. Cerita novel ini mengajarkan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan. Dengan gaya bahasa yang cantik, SDD berhasil membawa pembacanya menyelami alur cerita romansa. Setiap kata dan kalimat tersusun seperti syair puisi. Sangat cocok dibaca para penggemar novel percintaan sekaligus penggemar bahasa puitis namun tetap ringan, novel ini sangat cocok dinikmati di waktu senggang Anda!

Peresensi Danik Setyowati



Judul:
Hujan Bulan Juni (Sebuah Novel – Cover Film)
Pengarang:
Sapardi Djoko Damono
Penerbit:
Gagas Media
Kota Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2015 (terbitan pertama)
Deskripsi Fisik:
146 Halaman

Kunjungi Perpustakaan
Kementerian Keuangan
dan Jejaring Sosial Kami:
Gedung Djuanda I Lantai 2
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat



Perpustakaan
Kemenkeu

Perpustakaan
Kementerian
Keuangan

@kemenkeulib

www.perpustakaan.
kemenkeu.go.id

5 Buku Buku Pilihan Perpustakaan Kemenkeu:

- 1 [Filosofi Teras: Filsafat Yunani-Romawi Kuno Untuk Mental Tangguh Masa Kini](#)
Henry Manampiring
- 2 [11:11 Albuk #2](#)
Fiersa Besari
- 3 [Ceros dan Batozar](#)
Tere Liye
- 4 [The Art of Giving Back](#)
Nila Tanzil
- 5 [Berhenti di Kamu](#)
dr. Gia Pratama

Jelajah Bintang



Santai sejenak di rumah makan tepi laut

Foto Dok. Pribadi

Sebagai salah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang diberikan status Kawasan Bebas, Bintang lebih banyak dikenal dan dikunjungi untuk urusan bisnis bagi para pengunjung domestik. Padahal, setiap akhir pekan para turis dari Singapura berbondong-bondong membanjiri resort indah di sana. Selain dekat dan murah (dibandingkan dengan kurs mata uang dolar Singapura), Bintang sejatinya merupakan destinasi wisata yang layak dijadikan alternatif untuk disambangi.

Di pulau yang memiliki Tanjungpinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau, geliat pembangunan infrastruktur tampak masif. Sejak mendarat di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, aspal mulus dan bangunan baru terlihat di sepanjang jalan

berbukit. Pemandangan di Bintang didominasi warna tanah merah kecokelatan dan mangrove hijau yang kontras. Selain pasir putih dan panorama pantai yang menakjubkan, pulau seluas 1.173 km² ini juga menawarkan beragam atraksi wisata seperti makanan, tempat bersejarah, wihara, ataupun toko cokelat (impor nan murah meriah) yang pastinya bakal laris manis kalau dibawa ke kantor di hari senin.

Surga Seafood

Lupakan sejenak kadar kolesterol jika Anda berlibur di Bintang. Seafood menjadi menu yang jamak diujakan baik di pinggir jalan maupun di pinggir laut. Salah satu fauna yang menjadi makanan khas Bintang adalah gonggong, sejenis siput laut bercangkang putih kecokelatan. Saya merekomendasikan Anda untuk mengunjungi rumah makan tepi laut yang dapat dijumpai di sepanjang Jalan Raya Tanjung Uban–Tanjungpinang. Sembari menikmati menu ikan laut yang beberapa saat lalu masih berenang-renang di keramba, Anda akan disuguhi pemandangan laut lepas, camar di hutan bakau, serta lalu lalang kendaraan melintasi jembatan yang membentang di atas teluk.



Pulau Penyengat

Saya mengunjungi pulau ini selepas jam 5 sore dan lalu lintas dengan perahu pompong masih ramai. Dengan tarif Rp7.000, kita bisa menyeberang dari Pelabuhan Kuning Kota Tanjungpinang sekitar 15 menit saja. Hampir seluruh pulau ini adalah tempat bersejarah yang menakjubkan. Ingat Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Haji? Di sinilah asal muasal dan makam beliau. Kemudian, ada Masjid Sultan Riau yang berdiri sejak 1832 dengan campuran putih telur, Istana Raja Ali dengan toilet berbentuk kuncinya, gudang mesiu dan sumur air tawar yang kabarnya memiliki kandungan mineral tertinggi di dunia, rumah tabib yang dipenuhi akar pohon, dan banyak tempat lainnya. Menjelajahi seluruh pulau ini sangat mudah dengan bantuan ojek motor berkapasitas 2–4 orang seharga Rp30.000 saja. Kebanyakan sopir ojeknya juga merangkap pemandu yang menyenangkan dan informatif.

Pantai Trikora dan Lagoi Bay

Lagoi Bay adalah kawasan resort eksklusif yang dikelola asing dengan beberapa hotel bintang lima dan fasilitas liburan fantastis–tapi–mahal, termasuk Treasure Bay yang merupakan kolam renang terbesar se-Asia Tenggara. Kawasan pantai lainnya yang tak kalah menarik adalah Pantai Trikora 1–5 yang berurutan dari selatan ke utara. Pantai ini berombak tenang, dengan pasir putih selembut bedak bayi dan perairan dangkal yang luas. Di pantai Trikora 4 terdapat banyak bebatuan besar layaknya pantai di Belitung.

Masih banyak tempat menarik untuk dikunjungi di Bintang. Tiga maskapai melayani rute penerbangan langsung Jakarta–Tanjungpinang. Harga tiketnya relatif murah. Apalagi jika mau via Batam, pilihan penerbangannya lebih beragam dan ekonomis. Jadi, kapan jelajahi Bintang?

Teks Sanda Aditya



Salah satu sudut Trikora

Gonggong, makanan khas Bintang

Foto Dok. Pribadi

Belajar Saham Bagi Karyawan

Suasana Bursa Efek Indonesia

Foto
Anas Nur Huda

Hari *gini* ternyata masih banyak karyawan yang merasa bingung memilih instrumen investasi yang pas untuk penghasilannya. Salah seorang karyawan akhirnya mencoba membeli saham yang sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Nah kali ini, kita akan mengulas topik terkait pertanyaan-pertanyaan populer yang sering dilontarkan karyawan tersebut.

Saham apa yang bagus besok atau minggu depan atau bulan depan?

Pertanyaan ini menempati peringkat pertama dalam daftar tanya investor pemula. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa alasan yang menyebabkan pertanyaan itu muncul. Yang pertama, banyak orang malas belajar namun ingin memperoleh profit dengan cepat. Padahal, di balik keberhasilan memilih saham, ada upaya yang tidak sedikit dan jarang diketahui orang lain. Misalnya, membongkar laporan keuangan dan memilih prospektus yang terbaik. Bahkan, beberapa yang lain rela menghabiskan berjam-jam di depan komputer untuk melihat grafik saham. Intinya, tidak ada satupun yang instan.

Bagaimana caranya cepat kaya dari saham?

Bisnis saham bukan perkara cepat

menjadi tajir, namun terkait siapa yang memiliki mental kuat ketika badai menerpa. Kita tidak akan banyak belajar ketika indeks sedang *bullish* atau bertendensi membaik. Namun sebaliknya, mental Anda akan terasah jika Anda belajar dalam kondisi *bearish* atau bertendensi melemah. Oleh sebab itu, kita perlu tetap mensyukuri apa saja kondisi portofolio yang kita miliki, baik dalam kondisi naik ataupun turun.

Apa yang dasar pemilihan saham A, B, C, dan seterusnya?

Ini menjadi pertanyaan yang menarik. Karakteristik *trading* saham tidak lepas dari sifat pribadi sang eksekutornya. Saya sendiri lebih menyukai campuran antara yang berisiko tinggi dan rendah. Mengejar profit di saham-saham yang berisiko tinggi, sementara jangkarnya ada di yang rendah risiko. Memang tidak selalu berhasil, namun secara garis besar lebih sering menghasilkan profit yang lumayan.

Bagi Anda yang pemula, kita akan kembali ke *basic* dahulu. Entah ingin berencana menjadi trader agresif ataupun investor defensif, Anda harus sudah paham setiap konsekuensinya. Konsep “*high risk-high return, low risk-low return*” akan selalu berlaku.

Apakah kita benar-benar akan mendapat dividen setelah membeli saham?

Jawabannya bisa ‘iya’ dan bisa ‘tidak’. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan memiliki laba Rp200 miliar, maka bisa disepakati berapa yang akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen sebesar Rp100 miliar, Rp50 miliar, atau tidak sama sekali. Keuntungan dari investasi saham bisa berupa dividen atau kenaikan harga saham. Dengan tidak membagi dividen namun dialihkan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, maka kenaikan harga saham pun berpotensi meningkat dan itu menjadi potensi margin profit bagi Anda.

Terakhir, bisakah uang yang diinvestasikan untuk membeli saham hilang?

Saya yakin sangat bisa. Misalnya, perusahaan yang sahamnya kita beli mengalami kebangkrutan dan asetnya sudah habis dijual untuk membayar utang perusahaan dan kewajiban lainnya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk kita.

Andhika Diskartes,
Perencana Keuangan, founder diskartes.com, dan penulis buku *Investory* dan buku *Investory “X”*.

Mas Praim



Cerita : Dimach Putra

Gambar : Bimo Adi





BERSIHKAN HATI
RAWAT SILATURAHMI

Foto: Arief K.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA